



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan  
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

# LAPORAN KINERJA

2022

*Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan*



Copyright  
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan  
2022

**Penyusun**

**Pereviu**

**Desain dan Tata Letak**

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan  
Kompleks Kemdikbud-Ristek, Gedung E Lantai 19  
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270  
Telp. 021 - 5713827  
[puslitjakbud@kemdikbud.go.id](mailto:puslitjakbud@kemdikbud.go.id)



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan  
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

# Laporan Kinerja

**Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**  
*Tahun 2022*



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan tahun 2022. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan pada tahun 2022 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakanbidangpendidikan dan kebudayaansertapeningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan pada tahun 2022.



Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan,  
Irsyad Zamjani, Ph.D

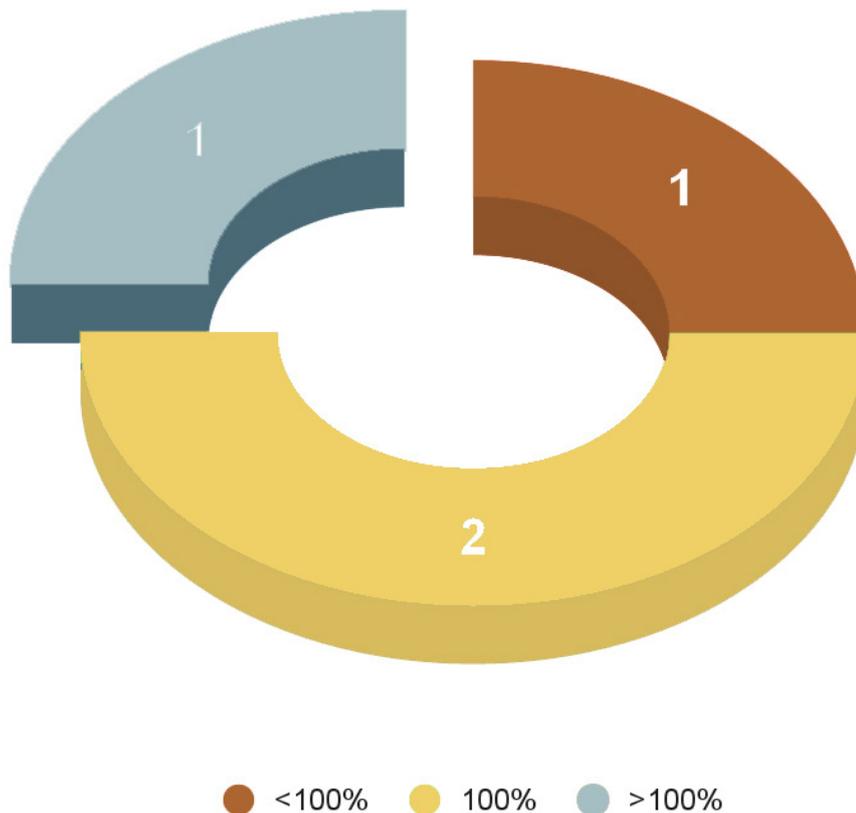


# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>Gambaran Umum</b>	<b>9</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>9</b>
<b>Tugas dan Fungsi</b>	<b>10</b>
<b>Struktur Organisasi</b>	<b>11</b>
<b>Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi</b>	<b>12</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
<b>Visi</b>	<b>15</b>
<b>Misi</b>	<b>15</b>
<b>Rencana Kinerja Jangka Menengah</b>	<b>19</b>
<b>Perjanjian Kinerja Awal</b>	<b>19</b>
<b>Perjanjian Kinerja Akhir</b>	<b>20</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
<b>Capaian Kinerja</b>	<b>25</b>
<b>Sasaran Kegiatan 1</b>	<b>25</b>
<b>Indikator Kegiatan 1.1</b>	<b>26</b>
<b>Indikator Kegiatan 1.2</b>	<b>39</b>
<b>Sasaran Kegiatan 2</b>	<b>45</b>
<b>Indikator Kegiatan 2.1</b>	<b>45</b>
<b>Indikator Kegiatan 2.2</b>	<b>48</b>
<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>51</b>
<b>Capaian Anggaran</b>	<b>51</b>
<b>Efisiensi Anggaran</b>	<b>52</b>
<b>Inovasi, Penghargaan, dan Program <i>Crosscutting / Collaborative</i></b>	<b>53</b>
<b>Inovasi</b>	<b>53</b>
<b>Penghargaan</b>	<b>54</b>
<b>Program <i>Crosscutting / Collaborative</i></b>	<b>54</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>59</b>
<b>Lampiran</b>	<b>64</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Pusat Standar Dan Kebijakan Pendidikan Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini. Secara umum, capaian kinerja Pusat Standar Dan Kebijakan Pendidikan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Sasaran Kegiatan #1 Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

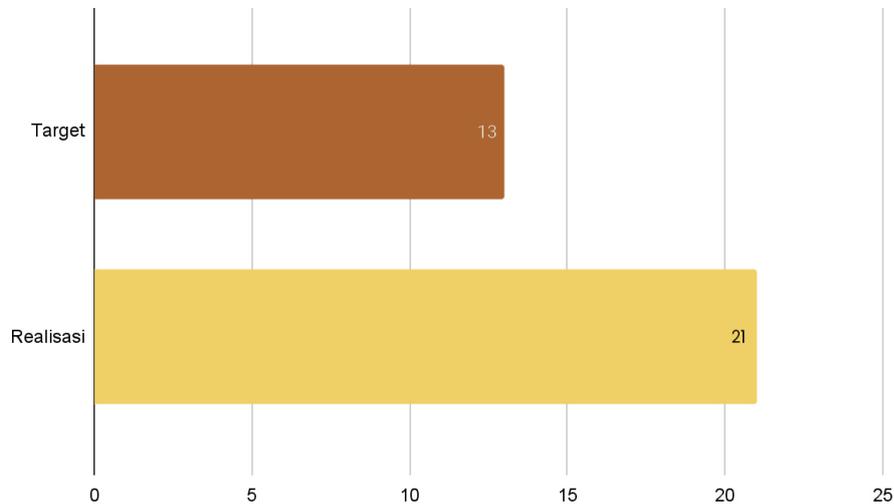


IKK

## #1.1

Jumlah hasil analisis  
kebijakan pendidikan

Capaian Tahun 2022

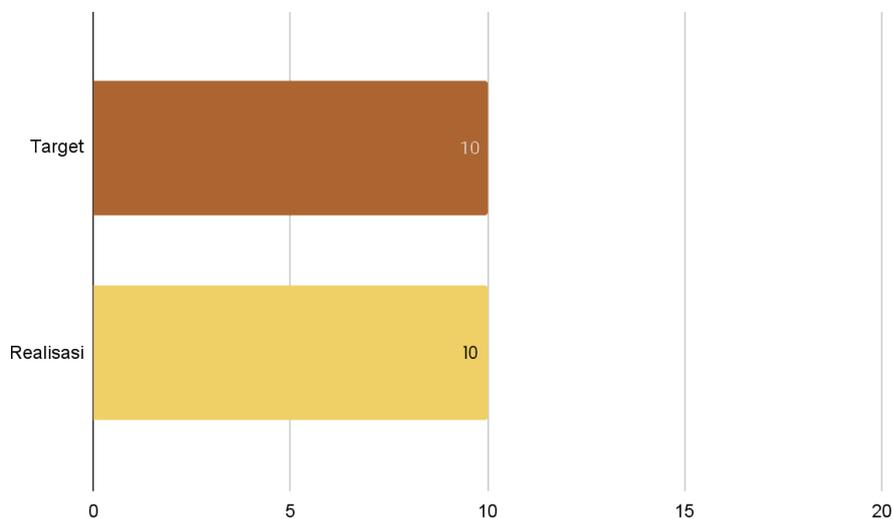


IKK

## #1.2

Jumlah rekomendasi  
standar di bidang  
pendidikan

Capaian Tahun 2022



Sasaran Kegiatan #2 Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.

IKK

## #2.1

Predikat SAKIP Pusat  
Standar dan Kebijakan  
Pendidikan

Target 2022

Capaian 2022

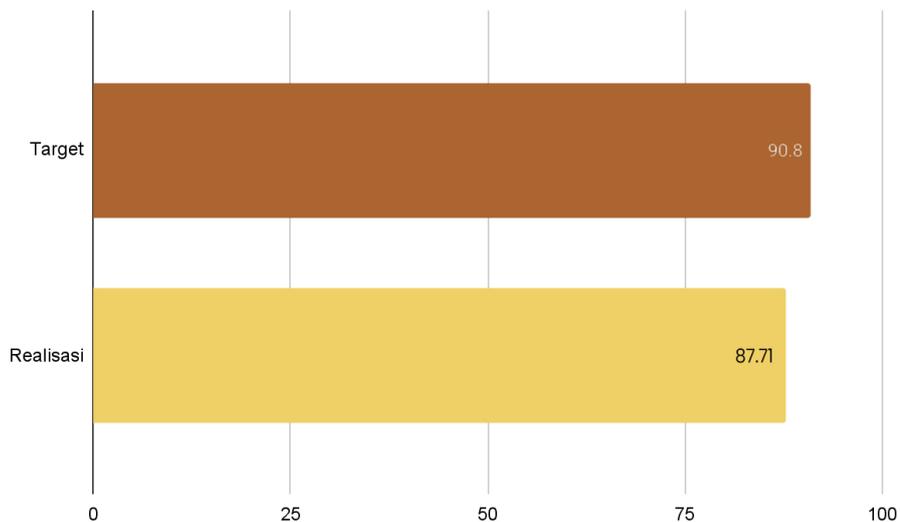
A

A

**IKK**

**#2.2**

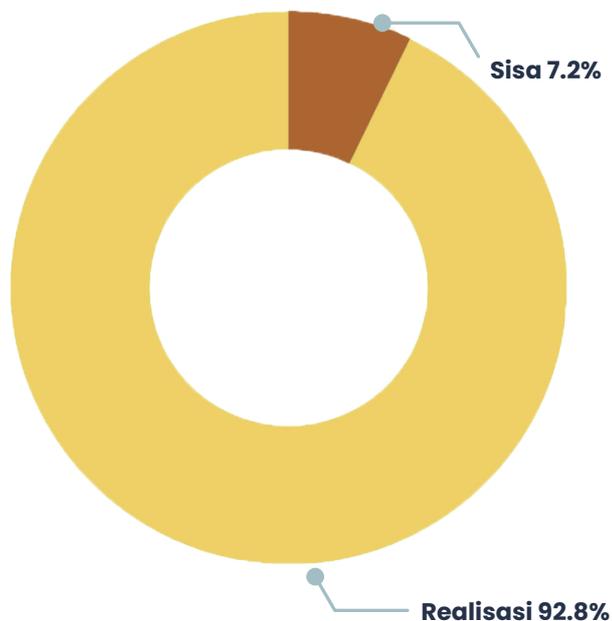
*Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan*



**KINERJA REALISASI ANGGARAN**

**Pagu**  
**52.217.117.000**

**Realisasi**  
**48.471.284.879**





## **Hambatan/ Kendala**

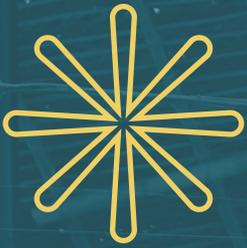
1. Pergantian kode satker dari Puslitjak menjadi PSKP di KPPN membuat proses pelaksanaan kegiatan sedikit terlambat
2. Adanya perubahan kebutuhan pelaksanaan kegiatan sehingga memerlukan pergeseran anggaran antar output/komponen
3. Deviasi halaman III DIPA
4. Permasalahan pada kegiatan pemetaan hasil evaluasi sistem pendidikan dimana kegiatan terhambat karena permasalahan izin akses untuk data dalam *Platform* rapor pendidikan yang akan diolah sehingga kegiatan belum dapat dilanjutkan.
5. Kesulitan dalam penentuan waktu kegiatan karena anggota tim penyusun standar bukan dari staf PSKP sehingga sulit untuk menentukan jadwal.
6. Permintaan dari dirjen GTK untuk memundurkan penyusunan standar pengawas.
7. Sulitnya memfasilitasi diskusi terutama pada saat terjadi diskusi yang intensif antar anggota tim.
8. Masih ada item anggaran yang terkunci
9. Banyak kegiatan yang perlu untuk mengikuti sistem lain yang berjalan, sehingga penjadwalannya harus dilaksanakan pada semester 2 tahun ini
10. Kurangnya SDM baik dalam jumlah maupun kapasitas
11. Dengan padatnya waktu pelaksanaan kegiatan, kurang adanya cukup waktu untuk melakukan proses berpikir untuk merumuskan rekomendasi kebijakan
12. Membutuhkan pendampingan dalam proses merumuskan rekomendasi
13. Adanya arahan untuk menyelaraskan standar yang disusun dengan peraturan permendikbud lainnya.
14. Munculnya dinamika dengan Tim Pengarah terutama mengenai standar yang sudah disusun
15. Ada item anggaran dari belanja model (kendaraan dinas dan perangkat laptop) yang masih dikunci sehingga tidak dapat direalisasikan
16. Penyesuaian skala data yang harus menunggu dari pemilik data sehingga menghambat proses penyusunan Report
17. Report mengenai Kualitas hasil belajar literasi, numerasi, dan karakter yang memerlukan data AN tahun 2022 sehingga tidak dapat diterbitkan pada tahun ini
18. Kemunduran proses harmonisasi dikarenakan perlu menunggu revisi PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan PP 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
19. Kesulitan dalam menyamakan jadwal koordinator untuk dapat melakukan evaluasi secara berkala
20. Penambahan anggaran pada akhir tahun membuat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan pada Triwulan 4.



## Tindak Lanjut

1. Melakukan akselerasi kegiatan pada Triwulan 2 dan Triwulan 3
2. Melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Melakukan update halaman III Dipa pada periode TW
4. Melakukan akselerasi untuk SK akses data dan pelatihan penggunaan data.
5. Menyesuaikan jadwal kegiatan dengan ketua tim penyusun standar.
6. Memampatkan waktu penyusunan standar pengawas.
7. Berusaha sebaik mungkin untuk menggiring diskusi tetap pada substansi yang ada dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Membuka item anggaran yang terkunci
9. Memampatkan kegiatan yang terhambat karena perlu menyesuaikan sistem lain.
10. Mengikutsertakan anggota tim dari koordinator lain yang kegiatannya sudah selesai untuk mengurangi beban pekerjaan anggota tim
11. Mengundang ahli pada bidang yang sesuai dengan topik rekomendasi sebagai pendamping
12. Melakukan revisi terhadap draft standar yang sudah disusun agar selaras dengan permendikbud yang sudah ada
13. Mengikutsertakan Tim Pengarah dalam proses penyusunan dengan melakukan update ke Tim Pengarah di tengah - tengah proses penyusunan standar.
14. Tindak lanjut yang dilakukan adalah menggeser anggaran yang dikunci kepada sisa anggaran gaji pegawai untuk kendaraan dinas sehingga bisa segera direalisasikan.
15. Mengadakan rapat kerja bersama dengan pemilik data untuk menyepakati metodologi untuk menyamakan skala dari data yang akan digunakan.
16. Merencanakan penerbitan selanjutnya dengan data T-1
17. Menyiapkan draf RPM standar yang sudah disesuaikan dengan revisi PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan PP 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan sehingga dapat segera diajukan jika revisi PP tersebut selesai dilaksanakan
18. Melakukan komunikasi secara personal kepada masing - masing koordinator untuk melakukan evaluasi
19. Melakukan revisi rencana kegiatan untuk dapat menyesuaikan dengan penyerapan anggaran baru.





Ayodhya

# BAB I

## PENDAHULUAN

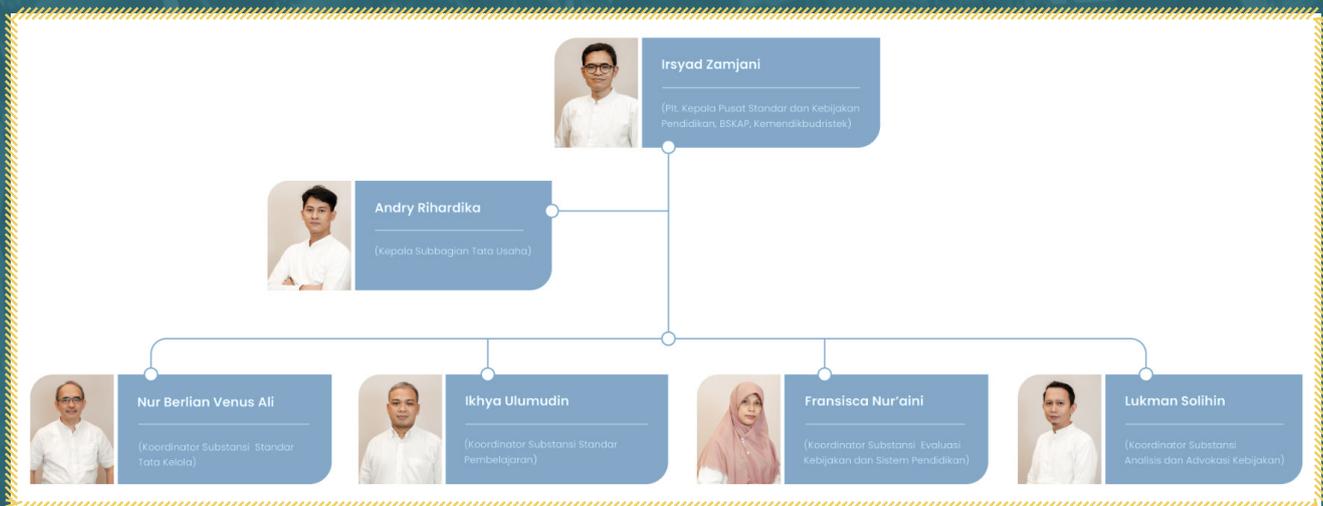


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Gambaran Umum

Pusat Standar Dan Kebijakan Pendidikan merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan. Sesuai dengan peraturan Permendikbud No 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pusat Standar Dan Kebijakan Pendidikan pertama kali dibentuk pada tanggal 28 Agustus tahun 2021. Pusat Standar Dan Kebijakan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Pusat dengan jumlah SDM sebanyak 67 orang.



### 2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024.

### 3. Tugas dan Fungsi

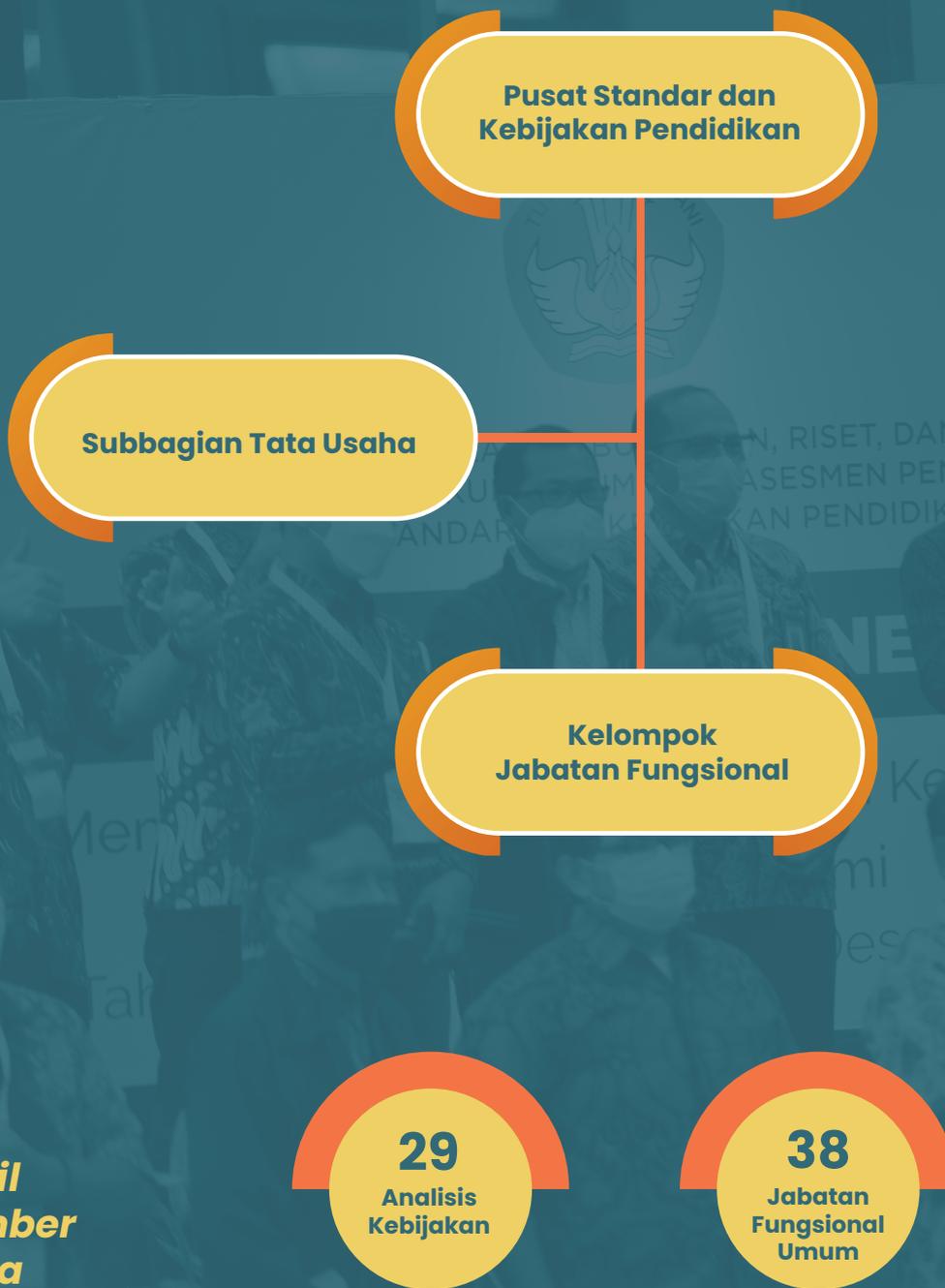
**Tugas :**

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021, Pusat Standar Dan Kebijakan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan standar, penyusunan standar, dan analisis kebijakan pendidikan.

Pusat Standar Dan Kebijakan Pendidikan Mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan kebijakan di bidang standar pendidikan
2. Pelaksanaan penyusunan standar di bidang pendidikan
3. Pelaksanaan analisis kebijakan pendidikan
4. Koordinasi dan fasilitasi di bidang standar dan kebijakan pendidikan
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standar dan kebijakan pendidikan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

#### 4. Struktur Organisasi



**Profil  
Sumber  
Daya  
Manusia**

**67**  
orang PNS

## 5. Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Meningkatnya angka partisipasi sekolah, namun tidak seiring dengan peningkatan kualitas hasil pembelajaran
2. Indikasi terjadinya krisis pembelajaran yang diperdalam adanya learning loss saat Pandemi COVID-19
3. Perlunya evaluasi mengenai program prioritas Kemendikbud Ristek yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir.

### Peran Strategis

1. Berperan penting dalam pengembangan Standar Pendidikan dengan Paradigma Baru
2. Berperan penting untuk mendorong kebijakan berbasis bukti melalui kajian dan evaluasi kebijakan
3. Berperan penting dalam memfasilitasi pengembangan Rapor Pendidikan untuk Evaluasi Sistem Pendidikan.







# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### 1. Visi dan Misi

#### Visi

“Menuju implementasi standar dan kebijakan pendidikan yang relevan, berkualitas, dan berkembang.”

Sebagai sebuah unit kerja strategis, PSKP diharapkan dapat berperan dalam mendukung implementasi standar dan kebijakan pendidikan pada tahapan penyusunan dan evaluasi kebijakan. Dengan dukungan-dukungan tersebut, unit-unit kerja yang terlibat dalam menyusun kebijakan pendidikan diharapkan dapat makin kapabel dalam membuat kebijakan pendidikan relevan, berkualitas, dan berkembang.

Relevan artinya kebijakan yang disusun sesuai dengan prioritas masalah dan kebutuhan yang dihadapi, baik di pusat maupun daerah. Berkualitas artinya kebijakan pendidikan yang disusun tidak hanya sebatas administrasi tetapi juga berbobot dan berdampak pada peningkatan indikator-indikator pendidikan. Berkembang artinya kebijakan yang disusun dievaluasi dengan baik dan hasil evaluasinya benar-benar digunakan untuk perbaikan kebijakan.

#### Misi

**Misi Pertama:** “Menyusun standar pendidikan yang relevan dengan penyempurnaan berkelanjutan”

Standar pendidikan yang relevan perlu disusun secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan penyempurnaan dari standar yang sudah ada. Dalam melakukan proses tersebut, PSKP perlu menyusun alur

pengembangan standar pendidikan dengan rapi. Alur penyempurnaan tersebut, sesuai dengan PP Nomor 57 Tahun 2021, perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pada prosesnya, penyempurnaan tersebut harus mempertimbangkan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, PSKP berkomitmen untuk menyusun alur rencana penyempurnaan pada standar-standar pendidikan yang nantinya akan dilakukan pada 5 (lima) tahun ke depan, dari 2023 sampai 2027.

**Misi Kedua:** “Mendukung kebijakan pendidikan yang strategis dan berdampak sistemis”

Kebijakan pendidikan perlu disusun dengan dukungan data, temuan, dan pertimbangan lain yang relevan. Oleh karena itu, PSKP perlu mendukung penyusunan kebijakan pendidikan melalui beberapa rumpun kegiatan.

**Strategi Kegiatan 1: Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan**

Kajian strategis adalah kajian menyeluruh yang dilakukan oleh PSKP dalam mempersiapkan dan mendukung proses penyusunan kebijakan pendidikan strategis pada tingkat nasional. Pada kegiatan ini, PSKP mengumpulkan data-data secara umum untuk memetakan permasalahan pendidikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, PSKP akan menyusun prioritas-prioritas masalah dan mencari solusi yang relevan, baik yang diformulasikan sendiri maupun yang diadaptasi dari praktik di tempat lain.

Hasil studi strategis dapat digunakan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan di bidang pendidikan oleh PSKP maupun unit lain di Kemendikbudristek. Dalam hal ini, PSKP berperan dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan agar tepat sasaran dan menghasilkan dampak yang diinginkan.

**Strategi Kegiatan 2: Evaluasi Cepat Kebijakan Pendidikan**

Evaluasi cepat dapat dilakukan sewaktu

waktu untuk menunjukkan dampak awal dari implementasi suatu kebijakan. Evaluasi cepat memiliki siklus, cakupan, dan metode yang lebih sederhana dari evaluasi dampak pada umumnya. Pengambil kebijakan dapat melihat sinyal awal implementasi kebijakan untuk menjadi dasar dalam memutuskan tindak lanjut pada kebijakan terkait.

### Strategi Kegiatan 3: Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan rangkaian kajian kebijakan pendidikan yang menyeluruh yang mengobservasi tidak hanya segi luaran dan hasil, tetapi juga dampak yang lebih luas. Evaluasi kebijakan pendidikan umumnya dilakukan dalam beberapa tahun agar secara utuh memberikan data dan informasi bagaimana proses kebijakan tersebut diimplementasikan pada tahap awal hingga berdampak.

### Strategi Kegiatan 4: Dukungan Fasilitasi Kebijakan Pendidikan

Proses penyusunan kebijakan pendidikan merupakan beban pekerjaan yang relatif besar. Karena besarnya beban dan begitu penting hasilnya, PSKP perlu mengambil peran fasilitasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyusunan kebijakan pendidikan yang sebatas administrasi saja. Selain itu, PSKP juga dapat memberikan masukan-masukan agar kebijakan pendidikan, baik di pusat maupun daerah, selaras dan saling melengkapi.

Bentuk dukungan kebijakan yang dapat dilakukan PSKP antara lain terlibat sebagai fasilitator dalam diskusi-diskusi kebijakan, menyediakan informasi dan pertimbangan yang relevan, serta melakukan advokasi kebijakan yang berpeluang mengatasi masalah-masalah prioritas yang ada di tingkat pusat dan spesifik di daerah.

### Strategi Kegiatan 5: Pengelolaan Kolaborasi Studi Kebijakan

Perlu disadari bahwa PSKP bukanlah satusnya unit kerja yang melakukan kajian kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, PSKP perlu mengambil peran sebagai pengelola studi

(*research manager*) yang dapat memetakan pihak mana saja yang melakukan kajian kebijakan apa saja. Jika dirasa perlu, PSKP pun dapat menjadi jembatan kolaborasi antar pihak yang melakukan kajian kebijakan. Selain itu, PSKP juga dapat menjadi wadah yang melakukan kurasi kajian kebijakan pendidikan dan meneruskannya kepada unit-unit kerja terkait di Kemendikbudristek sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

**Misi Ketiga:** “Mengembangkan kapasitas lembaga untuk tumbuh dan berkolaborasi”

Dalam melaksanakan dua strategi sebelumnya, PSKP perlu memastikan adanya ruang perubahan untuk tumbuh dan berkolaborasi. Oleh karena itu, sebagai unit kerja yang hasil pekerjaannya bertumpu pada produktivitas sumber daya manusia, PSKP juga perlu memasukkan agenda pengembangan lembaga sebagai strategi utama.

Ada dua komponen yang penting PSKP perhatikan dalam meningkatkan kapasitas lembaga. Pertama, PSKP perlu meningkatkan kualitas SDM dan pola kerja agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Kedua, mengingat pemangku kepentingan PSKP ada di pusat dan daerah, PSKP juga perlu meningkatkan kapasitas untuk menampilkan diri dan berkomunikasi ke luar, termasuk kepada publik.



## 2. Rencana Kinerja Jangka Menengah

**Tabel Renstra Satker**

	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	SK			
1.1	Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	IKK	13	13	13
1.2	Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	IKK	10	10	10
2.0	Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	SK			
2.1	Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	IKK	A	A	A

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Pusat Standar Dan Kebijakan Pendidikan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

### Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	13
	[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	10
	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	A
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	90.8

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	22.969.950.000
6696	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan	31.093.296.000

Seiring berjalannya waktu terdapat perubahan dari total anggaran yang diamanatkan pada Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Dengan adanya kebijakan Badan Riset Nasional (BRIN), dimana sebagian besar pengampu Jabatan Fungsional Peneliti yang sebelumnya berada di PSKP beralih menjadi peneliti BRIN. Oleh karena itu anggaran belanja pegawai yang sebelumnya di alokasikan pada DIPA PSKP dialihkan dan mengurangi alokasi belanja pegawai PSKP sehingga merubah alokasi anggaran pada Dukungan Manajemen yang semula sebesar Rp22.969.950.000,- menjadi Rp13.919.417.000,-.

Pada akhir tahun 2022, PSKP mendapat tambahan alokasi dana pada kegiatan Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan sehingga menambah alokasi anggaran menjadi Rp38.297.700.000,-. Penambahan alokasi tersebut diperuntukan untuk memperkuat pelaksanaan evaluasi program prioritas yang dilakukan oleh PSKP dan untuk melaksanakan kajian awal mata pelajaran wajib bahasa inggris pada jenjang SD/MI.

### Perjanjian Kinerja Akhir

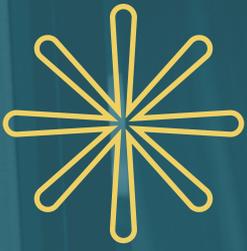
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022	
[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	13	<input type="radio"/>
	[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	10	<input type="radio"/>
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	A	<input type="radio"/>
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	90.8	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	13.919.417.000
6696	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan	38.297.700.000

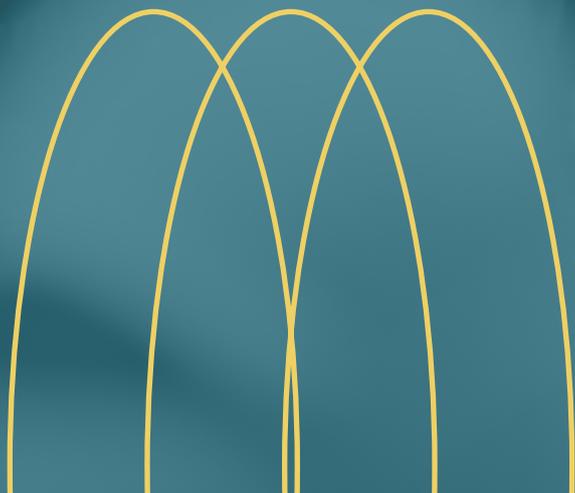
### Program prioritas

1. Penyusunan Standar Nasional Pendidikan
2. Evaluasi Program Sekolah Penggerak
3. Evaluasi Program SMK Pusat Keunggulan
4. Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka
5. Analisis Pemetaan Mutu Pendidikan
6. Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan





KEMEN  
BAD  
DIDIKAS  
R, KUN  
ANDAR  
N, RISET, DAN  
ASESMEN PEND  
KAN PENDIDIK





# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### I. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Pusat Standar Dan Kebijakan Pendidikan menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	13	21	161%
Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	10	10	100%
Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	A	A	100%
Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	90.8	87.71	96%

#### Sasaran Kegiatan 1

Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

##### Sasaran Kegiatan #1:

Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

#### IKK #1.1

Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan

#### IKK #1.2

Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan

Kedua IKK yang diemban PSKP telah mencapai 100% atau sesuai dengan target, dengan salah satu IKK mencapai lebih dari 100% yaitu "Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan"

### Indikator Kegiatan 1.1 Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan

Analisis kebijakan Pendidikan merupakan proses melakukan kajian dan/atau analisis terhadap masalah/isu Pendidikan serta evaluasi terhadap kebijakan di bidang Pendidikan yang hasilnya dapat direkomendasikan kepada pengambil kebijakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan dihitung dengan menjumlahkan seluruh kegiatan yang menghasilkan rekomendasi kebijakan pendidikan pada tahun berjalan.

Capaian jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:

Target 2022	Capaian 2022
13	21

Jauhnya capaian antara realisasi dengan target dikarenakan adanya permintaan-permintaan untuk melakukan analisis terhadap suatu kebijakan dari berbagai direktorat teknis terkait. Selain adanya kebutuhan akan analisis terhadap suatu kebijakan, pengembangan Profil/Rapor Pendidikan untuk evaluasi sistem pendidikan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 menjadi tugas PSKP untuk memfasilitasi walaupun tidak menjadi tugas dan fungsi utama.

IKK jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan ini adalah IKK baru dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan yang baru terbentuk selama satu tahun, sehingga tidak terdapat IKK yang serupa pada tahun sebelumnya

Tahun berjalan	2022	2023	2024
Target	13	13	13
Capaian	21	-	-
Persentase	161%	-	-



Daftar judul kegiatan yang menghasilkan rekomendasi untuk pencapaian Indikator Kinerja Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Studi Cepat Adaptasi Perubahan Kurikulum di Jenjang SMA

Studi ini menghasilkan rekomendasi (1) Perlu sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepala sekolah dan guru terkait mekanisme perubahan kurikulum, khususnya di kelas XI dan XII, serta informasi terkait sinkronisasi dengan PT, (2) Sekolah dan guru memerlukan pendampingan terutama dalam melakukan pemetaan minat kepada siswa dan mengorganisasikan pembelajaran, dan (3) Sekolah dan guru memerlukan kejelasan dan dukungan regulasi, misalnya terkait aturan jam mengajar guru, sertifikasi, serta sinkronisasi dengan PT.

2. Studi Cepat dalam rangka Mendukung Penyusunan Laporan *G20 Education Working Group*

Studi ini menghasilkan laporan pada forum *G20 Indonesian Presidency Education Working Group "Recover Together, Recover Stronger Through Education"*

3. Studi Cepat Pembelanjaan BOS/BOP Reguler untuk mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka

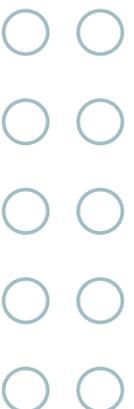
Studi ini menghasilkan rekomendasi (1) bahwa Sosialisasi/bimbingan teknis tentang implementasi KM perlu dilengkapi dengan informasi mengenai Penyediaan buku teks dengan anggaran BOS/BOP Reguler, Prosedur pembelian buku via SIPLah, dan Optimalisasi sumber belajar digital (PMM dan SIBI), (2) Mendorong dinas pendidikan turut menyosialisasikan kebutuhan buku teks KM dan HET sesuai SK Kepala BSKAP Nomor 020/H/P/2022 tentang HET.

4. Studi Cepat Analisis Dampak Implementasi Kurikulum Merdeka

Analisis antar survei ini merekomendasikan beberapa hal:

- a. Dari segi teknis, demi memungkinkan dan mengoptimalkan ketajaman analisis eksplorasi antar survei, baiknya instrumen survei ke depannya dibuat sama persis, baik pertanyaannya maupun pilihan responnya. Setidaknya, instrumen yang sama persis dapat diberikan untuk komponen survei yang cenderung berulang, seperti tingkat kesiapan responden dalam mengadopsi berbagai komponen IKM (KOSP, ATP, P5, dll). Akan lebih baik lagi apabila jumlah dan distribusi sampel dibuat serupa untuk ketiga jalur IKM, semua jenjang pendidikan, dan semua provinsi.

- b. Meski kemajuan dapat terlihat untuk mayoritas parameter analisis eksplorasi antar survei, adopsi pembelajaran berdiferensiasi terlihat cukup menantang dan patut menjadi fokus bantuan untuk satpen.
  - c. Patut dieksplorasi juga alasan di balik lambannya kemajuan satpen jalur Mandiri Berbagi pada beberapa parameter, karena jalur ini seharusnya yang paling siap melaksanakan IKM.
5. Studi Mendalam Studi Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka
- Hasil studi mendalam tersebut menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Keberadaan komunitas belajar di sekolah perlu didorong: agar lebih aktif (memiliki kegiatan rutin mingguan atau dua mingguan); fokus membahas masalah pembelajaran; dan memanfaatkan sumber-sumber belajar IKM, seperti PMM, seri *webinar*, dan panduan kurikulum.
  - b. Dukungan kepada komunitas belajar baik oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan diperlukan agar keberadaan komunitas belajar dapat lebih optimal. Dukungan tidak hanya berupa imbauan, tetapi fasilitasi, pendampingan, dan penyediaan narasumber berbagi praktik baik di daerah.
  - c. PMM perlu didorong untuk lebih dimanfaatkan dalam komunitas belajar sebagai sumber belajar bersama.
  - d. Perlu menyediakan sumber belajar yang ada di dalam PMM dalam versi *offline*, sehingga memungkinkan diakses oleh guru ataupun kepala sekolah yang mengalami keterbatasan akses maupun infrastruktur.
  - e. Partisipasi kepala sekolah dan guru dalam seri *webinar* menunjukkan bahwa materi yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan mereka.
  - f. Perlu meningkatkan sosialisasi kepada kepala sekolah dan guru yang belum mengetahui seri *webinar*. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah menyediakan rekaman *offline* untuk mereka yang memiliki keterbatasan perangkat dan akses internet.
  - g. Sosialisasi data narasumber berbagi praktik baik kepada kepala sekolah maupun guru yang tersedia di PMM sehingga dapat digunakan oleh sekolah maupun komunitas belajar di setiap daerah. Jika dimungkinkan, daftar narasumber juga disediakan secara *offline*.
  - h. Manfaat adanya mitra pembangunan dianggap positif, sehingga peran ini dapat diluaskan kepada lebih banyak sekolah.
  - i. Perlu evaluasi dan refleksi secara berkala terhadap efektivitas pendampingan mitra pembangunan dan





dukungannya terhadap implementasi Kurikulum Merdeka.

- j. Pemerintah perlu lebih mendorong sosialisasi dan informasi mengenai pusat layanan bantuan (*helpdesk*) yang dapat digunakan oleh sekolah maupun komunitas belajar.
- k. Melakukan evaluasi berkala mengenai pusat layanan bantuan (*helpdesk*), khususnya terkait proses bisnis dan kecepatan dalam merespons pertanyaan-pertanyaan yang masuk.
- l. Penerapan Kurikulum Merdeka perlu menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada murid, terutama dengan menerapkan asesmen awal pembelajaran dan pembelajaran berdiferensiasi.
- m. Sosialisasi, pelatihan, dan pembahasan pada komunitas belajar perlu difokuskan untuk mendukung penerapan asesmen awal pembelajaran dan pembelajaran berdiferensiasi.

#### 6. Studi Mendalam Kolaborasi Kebijakan Pendidikan Pemerintah Pusat dan Daerah

Secara umum program/kebijakan dan enam strategi dukungan yang disediakan pemerintah untuk mendorong IKM oleh sekolah dan guru sudah diketahui dan dimanfaatkan, meskipun belum optimal dan masih terjebak pada miskonsepsi tentang adoption rate. Praktik pembelajaran berpusat pada murid juga perlu lebih banyak mendapat perhatian karena masih banyak kebingungan dalam pelaksanaannya. Sehingga, perlu strategi kebijakan yang lebih strategis melibatkan seluruh pihak agar lebih mendorong pemanfaatan strategi dukungan IKM yang disediakan Kemdikbud tersebut agar dapat dimanfaatkan dengan optimal serta lebih banyak mendorong pemahaman substansi dan praktik pembelajaran agar dapat dipahami guru.

#### 7. Evaluasi Implementasi Program Sekolah Penggerak

Tujuan dari evaluasi Implementasi Program Sekolah Penggerak terdiri dari tiga hal, yaitu: a) mengukur efektivitas program; b) untuk mendapatkan informasi tentang proses penerapan program serta hasil-hasil awal yang diperoleh selama masa intervensi c) memahami potensi masalah selama program berlangsung sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan program d) memberikan rekomendasi perbaikan program baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun panjang. Berikut pemanfaatan evaluasi implementasi PSP dalam pengembangan Program Sekolah Penggerak yang telah dilakukan pada tahun 2022:

- a. Merekomendasikan beberapa model distribusi modul pelatihan dan model metode pelatihan melalui pemetaan model modul pelatihan (cetak/ *flashdisk* atau LMS) dan metode pelatihan (daring atau luring) dalam intervensi pelatihan melalui *survey* kondisi awal pada satuan pendidikan berdasarkan sarana dan prasarana dan SDM yang dimiliki. Contoh pemanfaatan: Bagi sekolah yang tidak memiliki akses listrik akan diberikan modul pelatihan berupa cetak sementara sekolah yang tidak memiliki akses akses internet modul pelatihan akan dikirim melalui *flashdisk* dan yang memiliki akses internet stabil pembelajaran akan menggunakan LMS.
- b. Memberikan *input* pada metode sosialisasi terkait perbaikan laman sekolah penggerak dan aktivasi *helpdesk* sekolah penggerak melalui *survey* sosialisasi dan pemahaman program.
- c. Memberikan rekomendasi terhadap mekanisme seleksi agar mendapatkan kepala sekolah yang sesuai dengan harapan program dan melakukan perbaikan sistem seleksi melalui otomasi borang seleksi dan perbaikan sistem untuk mengurangi kecurangan selama proses seleksi melalui *survey* seleksi kepala sekolah
- d. Memberikan *input* atau rekomendasi terhadap desain pelatihan dari mulai metode pelatihan sampai dengan pengukuran tingkat pemahaman peserta pelatihan melalui *survey* pelatihan dan *survey* bimtek pelatih ahli.
- e. Memberikan rekomendasi terkait kinerja fasilitator sekolah penggerak dan memberikan skema pendampingan bagi satuan pendidikan melalui berbagai *survey* yaitu *survey* kurikulum, pendampingan dan kunjungan lapangan.
- f. Memberikan rekomendasi dan hasil terkait kinerja konsultan sebagai pendamping BPMP melalui *survey* efektivitas PMO.
- g. Memberikan rekomendasi terhadap BPMP terkait proses pendampingan pada dinas pendidikan melalui *survey* efektivitas PMO.
- h. Memberikan feedback pada kurikulum terkait struktur, konsep, modul dan skema penguatan melalui kunjungan lapangan dan *survey* adaptasi kurikulum.
- i. Memberikan masukan terkait digitalisasi di satuan pendidikan pada *Platform* merdeka mengajar, SIPLah, ARKAS dan *Platform* rapor pendidikan melalui *survey* digitalisasi sekolah.



#### 8. Evaluasi Dampak Program Sekolah Penggerak

Analisis Evaluasi dampak Program Sekolah Penggerak dilakukan melalui analisis karakteristik yang bertujuan untuk melihat pemetaan sekolah pelaksana program sekolah penggerak yang diambil dari data Asesmen Nasional. Pemetaan sekolah pelaksana PSP digunakan sebagai data dasar atau *baseline* untuk melihat perubahan/tren untuk tahun selanjutnya. Pemetaan yang dimaksud terbagi menjadi empat tahapan. Hasil analisis karakteristik menghasilkan.

Mayoritas satuan pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan 1 dan Angkatan 2 berada pada Tahap 2 dan Tahap 3. Peran yang diharapkan pada tahap ini ialah menciptakan kualitas pembelajaran holistik. Sementara itu, ada sebanyak 7,3% sekolah dari 6.913 sekolah PSP Angkatan 1 dan Angkatan 2 yang berada pada tahap 1. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih bagi setiap elemen pemangku kepentingan.

#### 9. Evaluasi Proses dan Konteks Perubahan Program Sekolah Penggerak

Evaluasi ini menghasilkan beberapa rekomendasi baik dalam konteks penguatan komitmen daerah dalam mendukung PSP maupun implementasi program di tingkat satuan pendidikan. Untuk menguatkan komitmen daerah dalam mendukung PSP, studi ini merekomendasikan beberapa hal berikut: (1) Diperlukan penguatan pada DisDik dan PMO mengenai program, hal ini didasarkan pada pergantian di pucuk pimpinan yang membuat dinamika baru di internal DisDik seperti belum adanya kesamaan persepsi - visi terhadap program, (2) Diperlukan penguatan kapasitas pengawas baik yang saat ini terlibat sebagai komite pembelajaran mendampingi satuan pendidikan pelaksana PSP, maupun pengawas-pengawas lain di daerah agar pengimbasan praktik baik dari PSP dapat terjadi di satuan-satuan pendidikan di sekitarnya. (3) Penguatan PMO BPMP terkait kapasitas SDM seperti komunikasi - advokasi kepada DisDik dan kemampuan membaca data kualitatif. (3) Komunikasi antara BPMP - BGP - Satuan - DisDik perlu ditingkatkan, selama ini masih terdapat *missing link* terutama antara DisDik dengan *stakeholder* lain terutama kepada satuan pendidikan.

Sementara itu, untuk menguatkan kualitas implementasi Program Sekolah Penggerak di tingkat satuan pendidikan, studi ini merekomendasikan beberapa hal berikut: (1) Diperlukannya penguatan pemahaman dan ketrampilan dalam implementasi Kurikulum Merdeka terutama bagi kepala sekolah dan guru. Hingga saat ini, masih ditemui beberapa miskonsepsi di satuan pendidikan PSP terkait implementasi Kurikulum Merdeka, (2) terkait dengan rekomendasi pertama, diperlukan optimalisasi

pemanfaatan *Platform Merdeka Mengajar* (PMM), (3) Mendorong pengimbasan praktik baik satuan pendidikan pelaksana PSP, terutama dalam konteks mendukung implementasi Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri.

10. Evaluasi Kebijakan Strategis (Sekolah Penggerak PAUD) Rekomendasi dari aspek kualitas proses pembelajaran dan kualitas pengelolaan PAUD:
- 1) Pendampingan dan pemantauan dari dinas Pendidikan, pelatih ahli yang satu pikiran diperlukan dalam memantau proses pembelajaran. Dalam pencapaian penerapan kurikulum untuk sekolah penggerak meliputi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan juga P5.
  - 2) Pendampingan sekolah NON Sekolah Penggerak PAUD untuk menciptakan ragam main dan merancang pendekatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka, P5, pembelajaran terdeferensiasi, pelatihan mengenai pengetahuan, penerapan dan pelaporan asesmen pembelajaran serta mengajak orangtua meningkatkan kehadiran siswa di kelas. Baik dari SP maupun dari dinas pendidikan dan UPT.
  - 3) Perlu disamakan persepsi mengenai kemitraan dengan orangtua, karena dalam aspek kemitraan dengan orangtua ini terjadi miskonsepsi dari sekolah, selain itu pemahaman tentang kemitraan dengan orangtua tercampur dengan pengertian parenting.
  - 4) Untuk memaksimalkan pembelajaran, sarpras untuk kebutuhan ABK/PDPD dan pelatihan guru terkait ABK. BOP Kinerja PSP dibuat lebih lugas peruntukan dapat diperluas untuk sarana prasarana yang menjadi kebutuhan sekolah, bukan hanya dalam sarpras yang terkait pelatihan pengembangan SDM saja.
  - 5) Perlu penjelasan pentingnya asesmen yang harus dilakukan oleh pendidik non SP karena dalam pembelajaran di sekolah non SP terjadi miskonsepsi antara asesmen awal dan akhir hasil pembelajaran. Asesmen awal penting untuk mengidentifikasi tentang kemungkinan seorang anak memiliki khusus sehingga diperlukan penyusunan dan pengembangan program pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Selain itu perlu peningkatan kerjasama dengan Puskesmas di satuan non SP.
  - 6) Perlu disederhanakan laporan administrasi yang harus dilakukan oleh pendidik PAUD berkaitan dengan perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran.
  - 7) Sosialisasi tentang Perencanaan Berbasis Data (PBD) belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) karena sosialisasi dilakukan bersama materi lainnya. Sosialisasi perlu dioptimalkan terutama di Wilayah Timur Indonesia. Pemerintah Pusat perlu selalu memberi informasi terbaru kepada mitra pembangunan yang akan mendampingi sekolah secara luring dalam perencanaan berbasis data.
  - 8) Akreditasi satuan PAUD

sebaiknya fokus pada proses pembelajaran, seperti metode pembelajaran yang digunakan, keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran belajar bermain, terdeferensiasi, berpusat pada siswa dan iklim sekolah yang kondusif.

#### 11. Evaluasi Kebijakan Strategis (Monev SMK PK)

Berdasarkan evaluasi proses dan konteks perubahan SMK PK bahwa program SMK Pusat Keunggulan secara umum membawa dampak positif dan perubahan pada satuan pendidikan maupun pengembangan pendidikan vokasi di daerah. Perlunya perluasan konsentrasi keahlian yang akan mendapatkan program SMK PK untuk menghindari kejenuhan dan penumpukan minat masyarakat terhadap SMK, selain bisa membantu SMK dalam meningkatkan pamor konsentrasi keahlian lain yang dimilikinya ke industri, sehingga pepadanan dan kerja sama dengan dunia kerja dapat terjalin optimal dan merata. Kedepannya, implementasi SMK PK untuk tingkat daerah bisa dioptimalkan dengan memberikan perhatian lebih pelibatan dan peran pemerintah daerah Dinas Pendidikan Provinsi, artinya diperlukan koordinasi yang terbuka dan efektif dalam menjalankan program bantuan ke SMK maupun pelaksanaan SMK PK antara pusat-daerah.

#### 12. Evaluasi Kebijakan Strategis (Monev Kampus Mengajar)

Berdasarkan evaluasi terhadap program Kampus Mengajar, terdapat beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain:

- a. Perlu mendorong agar pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
- b. Data AKM Kelas menunjukkan adanya perbaikan pembelajaran yang stabil di SD, tetapi tidak di SMP.
- c. Baiknya mahasiswa dipasangkan dengan sekolah atau kriteria sekolah yang mereka inginkan untuk mengurangi atrisi/pengunduran diri ketika pengumuman.
- d. Pengembangan dapat dilakukan untuk mengirimkan mahasiswa kesenian ke sekolah untuk mendukung pembelajaran di luar literasi dan numerasi.

#### 13. Analisis Hasil Kunjungan Kerja Pimpinan Implementasi Kurikulum Merdeka

Dari hasil kunjungan kerja Pimpinan terkait Implementasi Kurikulum Merdeka dapat diberikan rekomendasi (1) Fokus sosialisasi dan pendampingan kepada Pemda dapat berfokus pada 6 strategi IKM (2) Implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan perlu pendampingan dari Dinas Pendidikan, khususnya untuk fokus pada pembelajaran yang berpusat pada murid (3) Pelurusan

miskonsepsi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun pendampingan kepada Pemda melalui UPT Kemendikbud atau mitra pembangunan (4) Pemerintah melalui UPT Kemendikbud perlu memastikan dinas pendidikan dapat memfasilitasi satuan pendidikan yang memerlukan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi pelaksanaan IKM.

#### 14. Evaluasi Strategi Pendukung IKM di Daerah

Evaluasi ini menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain (1) Keberadaan komunitas belajar di sekolah perlu didorong: agar lebih aktif (memiliki kegiatan rutin mingguan atau dua mingguan); fokus membahas masalah pembelajaran; dan memanfaatkan sumber-sumber belajar IKM, seperti PMM, seri *webinar*, dan panduan kurikulum (2) Dukungan kepada komunitas belajar baik oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan diperlukan agar keberadaan komunitas belajar dapat lebih optimal. Dukungan tidak hanya berupa imbauan, tetapi fasilitasi, pendampingan, dan penyediaan narasumber berbagi praktik baik di daerah. (3) PMM perlu didorong untuk lebih dimanfaatkan dalam komunitas belajar sebagai sumber belajar bersama. (4) Perlu menyediakan sumber belajar yang ada di dalam PMM dalam versi *offline*, sehingga memungkinkan diakses oleh guru ataupun kepala sekolah yang mengalami keterbatasan akses maupun infrastruktur.

#### 15. Refleksi Kesiapan Implementasi Kurikulum Merdeka

Dari hasil refleksi dapat direkomendasikan bahwa (1) Selain menyediakan panduan yang sudah ada, perlu juga pelatihan dan pendampingan untuk membiasakan pembelajaran mandiri (penggunaan PMM), khususnya untuk pengembangan KOSP, pembelajaran dan asesmen, dan pengembangan P5, (2) Perlu mendorong satpen untuk melakukan analisis kebutuhan dan menyediakan sumber belajar (buku teks, nonteks, dsb) yang diperlukan sesuai rasio kebutuhan siswa. termasuk pelibatan dinas pendidikan untuk memastikan ketersediaan sumber belajar tersebut, (3) Pemanfaatan PMM perlu didorong oleh UPT dan pemda melalui sosialisasi dan pelatihan, khususnya secara luring, dan (4) *Webinar series* perlu mengakomodasi kebutuhan satpen untuk lebih praktis/operasional dalam menerapkan Kurikulum Merdeka melalui analisis persoalan/kendala yang dihadapi.

#### 16. Kajian Awal Kesiapan Bahasa Inggris untuk Mapel SD/MI

Dari kajian tersebut dapat dihasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Kemampuan Bahasa Inggris Guru SD/ sederajat (guru Bahasa Inggris atau guru yang akan diproyeksikan mengajar Bahasa Inggris) secara umum kurang



memadai dan terdapat disparitas kemampuan bahasa Inggris guru. Kompetensi guru pada domain *Grammar* dan *Vocabulary* lebih tinggi dibandingkan *reading* dan *listening*.

- b. Hampir semua Kepala Satuan Pendidikan dan guru setuju terhadap rencana penerapan Bahasa Inggris sebagai mapel di SD/ sederajat. Dalam FGD, dinas pendidikan pun setuju jika Bahasa Inggris diwajibkan (bukan pilihan) di tingkat SD.
- c. Implementasi pembelajaran Bahasa Inggris tidak menambah jam pelajaran, namun mengurangi jam pelajaran lain. Diantara sekolah yang sudah mengajarkan Bahasa Inggris, sekitar 60% pengajaran dilakukan oleh guru khusus Bahasa Inggris. Pengajaran dilakukan melalui lagu, hafalan *vocabulary* sederhana, *daily conversation*.
- d. Mengakomodasi harapan pemangku kepentingan yang mengharapkan mata pelajaran Bahasa Inggris dapat segera diwajibkan dalam kurikulum SD/ sederajat, dengan penerapannya dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan disparitas kompetensi guru, daerah.

Tidak diwajibkannya mata pelajaran Bahasa Inggris di SD/ sederajat diperkirakan berdampak memperlebar kesenjangan pendidikan. Siswa-siswa SD/ sederajat yang tidak mendapatkan pembelajaran Bahasa Inggris sejak dini diperkirakan memiliki peluang keberhasilan pendidikan yang lebih rendah, yang berdampak pada ketersediaan pekerjaan dan kesejahteraan.  
→ Analisis dampak terhadap peluang keberhasilan pendidikan dan kesenjangan ekonomi. Disisi lain, tidak diterapkannya Pembelajaran Mapel Bahasa Inggris di SD/ sederajat, membatasi kemampuan siswa pada jenjang pendidikan lebih lanjut dan mengurangi peluang mereka memanfaatkan tawaran beasiswa di berbagai Perguruan Tinggi secara global.

→ Analisis *opportunity loss* karena tidak termanfaatkannya peluang beasiswa global.

e. Sementara di sisi lain, Kemendikbudristek mempersiapkan persiapan lebih lanjut dengan memetakan kesiapan satuan pendidikan dalam penerapan bahasa Inggris, kompetensi dan kualifikasi guru, materi ajar, dll.

#### 17. Survei Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka & Analisis Media *Online* dan Media Sosial

Dari hasil survei diperoleh rekomendasi sebagai berikut  
(1) Perlu mengencangkan sosialisasi mengenai Kurikulum Merdeka, laman pendaftaran IKM, serta tata cara

pendaftaran, khususnya di daerah tertinggal dan jenjang sekolah yang belum tersosialisasi, (2) Upaya sosialisasi perlu diperluas dan melibatkan peran dinas pendidikan, UPT Kemendikbud, dan yayasan pengelola pendidikan masyarakat, terutama di daerah yang masih minim sosialisasi. Optimalisasi sosialisasi juga perlu dilakukan melalui media massa dan media sosial, (3) Beberapa substansi sosialisasi perlu disampaikan, antara lain terkait dengan pemahaman substansi kurikulum, serta identifikasi sumber daya sekolah dan melibatkan warga sekolah dalam penerapan Kurikulum Merdeka dan (4) Proses dan tahap pendaftaran perlu mengutamakan kenyamanan calon pendaftar, terutama terkait dengan durasi waktu pendaftaran agar tidak terlalu lama.

18. Survei Pelaksanaan Bimbingan Teknis dalam rangka Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka di Jenjang SMA

Survei tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut (1) Proses pelaksanaan bimtek dapat menjadi contoh baik untuk pelaksanaan bimtek-bimtek selanjutnya. (2) Materi prinsip dan penilaian P5, pemanfaatan modul ajar, pemilihan mapel pada empat kelompok disiplin ilmu, dan modifikasi/penyesuaian perangkat ajar masih perlu diperdalam. (3) Kebutuhan terhadap PMM semakin besar, sehingga fitur pelatihan mandiri serta contoh dan penerapan berbagai modul Kurikulum Merdeka perlu ditambah agar makin beragam. (4) Perlu dorongan agar ekosistem pendidikan di daerah mendukung rencana tindak lanjut dapat dilakukan, terutama dukungan dari dinas pendidikan di daerah, baik berupa kebijakan maupun dukungan anggaran dan penyediaan SDM yang memadai.

19. Pengembangan Rapor Pendidikan

Pengembangan Rapor Pendidikan menghasilkan beberapa rekomendasi, yang pertama adalah rekomendasi mengenai indikator yang ada dalam Rapor pendidikan yang kemudian digunakan sebagai landasan dari Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tentang indikator profil satuan pendidikan dan profil pendidikan daerah (SK KaBSKAP no 38/H/M/2022). Rekomendasi berikutnya adalah

20. Analisis Pemetaan Mutu Pendidikan

Analisis pemetaan mutu pendidikan menghasilkan analisis terhadap data Rapor Pendidikan dan hasil dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk buku. Hasil pemetaan mutu pendidikan pada tahun 2022 adalah empat buku dengan judul: Volume I. Hasil Belajar Literasi, Numerasi, dan Karakter Siswa Indonesia; Volume II. Praktik Baik Lingkungan Belajar dan Capaian Pembelajaran; Volume III. Pemerataan Pendidikan di Indonesia; dan Volume IV. Sekolah Tangguh Indonesia.





21. Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan  
Evaluasi pemanfaatan hasil evaluasi sistem pendidikan menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan baik untuk Kemendikbud Ristek, Dinas Pendidikan, maupun UPT Kemendikbud Ristek. Permasalahan yang banyak terjadi pada tahun pertama Pemanfaatan Hasil Evaluasi ini kebanyakan lebih kepada akses ke *Platform* Rapor Pendidikan dan pemanfaatan data Rapor Pendidikan Daerah dan Satuan Pendidikan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan ini menghadapi beberapa hambatan atau permasalahan sebagai berikut ini:

1. Pelaksanaan evaluasi program prioritas baru dapat dilaksanakan setelah program berjalan, sehingga agak mundur waktunya dari yang direncanakan semula di pertengahan tahun menjadi kuartal ketiga.
2. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak perwakilan unsur organisasi dan pimpinan tinggi di lingkungan Kemdikbudristek menyebabkan sulitnya untuk merencanakan waktu pelaksanaan kegiatan.

**Dari hambatan atau permasalahan yang muncul diatas, beberapa langkah antisipasi yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut adalah:**

- *Memanfaatkan semua kanal jaringan untuk mempercepat pelaksanaan evaluasi (melalui surat resmi, WA Blast kepada kelompok guru, kelompok kepala sekolah, dan dinas pendidikan) setelah program prioritas berjalan.*
- *Melakukan kegiatan dengan metode hybrid (luring dan daring) agar seluruh unsur dapat mengikuti kegiatan.*

**Beberapa strategi sudah dilakukan untuk mencapai target untuk Indikator Kinerja Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan ini. Strategi – strategi tersebut adalah:**

- *Melakukan kolaborasi dengan lembaga riset dalam pelaksanaan kegiatan.*
- *Pelibatan pelaku pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan untuk memperkuat proses dan analisis kajian.*

## Indikator Kegiatan 1.2

### Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan

Standar di bidang Pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai sistem atau komponen tertentu dari sistem Pendidikan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar di bidang Pendidikan dapat berupa Standar Nasional Pendidikan (SNP) maupun Standar di bidang Pendidikan yang lain di luar SNP.

#### SNP mencakup:

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi;
3. Standar Proses;
4. Standar Penilaian Pendidikan;
5. Standar Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana;
7. Standar Pengelolaan; dan
8. Standar Pembiayaan.

#### Standar di bidang Pendidikan yang lain di luar SNP, antara lain:

1. Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan;
2. Standar Pembelajaran Jarak Jauh;
3. Dan lain-lain.

Rekomendasi standar merupakan hasil pengembangan standar maupun hasil evaluasi terhadap suatu standar yang dapat direkomendasikan kepada pengambil kebijakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pendidikan.

Jumlah hasil rekomendasi standar di bidang pendidikan dihitung dengan menjumlahkan seluruh kegiatan yang menghasilkan rekomendasi standar di bidang pendidikan pada tahun berjalan.

Capaian jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

Target 2022	Capaian 2022
10	10

Jumlah capaian rekomendasi standar pada tahun berjalan dapat mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya pada Renstra PSKP.

IKK jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan ini adalah IKK baru dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan yang baru satu tahun dibentuk, sehingga tidak ada IKK serupa pada tahun sebelumnya.

Tahun berjalan	2022	2023	2024
Target	10	10	10
Capaian	10	-	-
Persentase	100%	-	-

**Daftar judul kegiatan yang menghasilkan rekomendasi standar untuk pencapaian Indikator Kinerja jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:**

- 1. Penyusunan Standar Tenaga Kependidikan**
- 2. Penyusunan Standar Kepala Satuan Pendidikan**
- 3. Pedoman Pengarusutamaan Pendidikan Inklusif**
- 4. Penyusunan Standar Pengelolaan Pendidikan**
- 5. Penyusunan Standar Pembiayaan Pendidikan**
- 6. Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan**
- 7. Evaluasi Standar Sekolah Rumah**
- 8. Evaluasi Standar Pendidikan Layanan Khusus**
- 9. Evaluasi Implementasi Standar Nasional Pendidikan: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan**
- 10. Kajian dan evaluasi Penguatan Efektivitas Kelembagaan BAN PAUD dan PNF dan BAN Sekolah/Madrasah**

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan diatas adalah:

1. Kegiatan Penyusunan Standar Tenaga Kependidikan menghasilkan Draf Rancangan Permendikbud Ristek terkait Standar Tenaga Kependidikan yang dimanfaatkan sebagai rancangan Permendikbud Ristek tentang Standar Tenaga Kependidikan.
2. Kegiatan Penyusunan Standar Kepala Satuan Pendidikan menghasilkan Draf Rancangan Permendikbud Ristek terkait Standar Kepala Satuan Pendidikan yang dimanfaatkan sebagai rancangan Permendikbud Ristek tentang Standar Kepala Satuan Pendidikan.
3. Kegiatan Pedoman Pengarusutamaan Pendidikan Inklusif menghasilkan rekomendasi kebijakan berupa Pedoman Pengarusutamaan Pendidikan Inklusif yang menjadi target Kemendikbud Ristek dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi HAM (RANHAM) 2021-2025
4. Kegiatan Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan menghasilkan Rekomendasi Kebijakan terkait Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan dan dimanfaatkan sebagai Rancangan Permendikbud Ristek tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.
5. Kegiatan Penyusunan Standar Pembiayaan Pendidikan menghasilkan Rekomendasi Kebijakan terkait Standar Pembiayaan Pendidikan dan dimanfaatkan sebagai Rancangan Permendikbud Ristek tentang Standar Pembiayaan Pendidikan.
6. Kegiatan Penyusunan Standar Pengelolaan Pendidikan menghasilkan Rekomendasi Kebijakan terkait Standar Pengelolaan Pendidikan dan dimanfaatkan sebagai Rancangan Permendikbud Ristek tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
7. Kegiatan Evaluasi Standar Sekolah Rumah menghasilkan Draf Rancangan Permendikbud Ristek terkait Penyelenggaraan Sekolah Rumah beserta Hasil Kajian Akademik yang dimanfaatkan sebagai rancangan Permendikbud Ristek tentang Standar Sekolah Rumah.
8. Kegiatan Evaluasi Standar Pendidikan Layanan Khusus menghasilkan rekomendasi berupa draft Rancangan Permendikbudristek mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Evaluasi Implementasi Standar Nasional Pendidikan: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan menghasilkan rekomendasi mengenai intervensi yang diperlukan agar stakeholder dapat mempelajari dan memahami regulasi baru terkait dengan 4 SNP.
10. Kajian dan evaluasi Penguatan Efektivitas Kelembagaan BAN PAUD dan PNF dan BAN Sekolah/Madrasah

menghasilkan rekomendasi untuk penguatan kelembagaan BAN PAUD dan PNF dan BAN S/M melalui penguatan mutu asesor; laporan hasil akreditasi yang lebih valid, praktis; dan efektif; serta perlunya aturan tindak lanjut hasil akreditasi yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah.

Dalam proses merealisasikan indikator kinerja ini, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target indikator kinerja ini. beberapa hal yang menjadi faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja adalah

1. Koordinasi dan *timeline* tahapan kegiatan yang telah diatur dengan seksama menyesuaikan jadwal dengan tim penyusun standar yang berasal dari unit/lembaga yang bervariasi.
2. Tim penyusun standar yang memiliki komitmen terhadap waktu dan substansi pekerjaan.
3. Formasi Tim penyusun yang lengkap dari berbagai instansi seperti akademisi, praktisi, lembaga mitra, dsb sehingga bisa memenuhi keterwakilan.
4. Dukungan pemangku kepentingan dalam membantu pelaksanaan kajian.

Sedangkan tidak ada faktor penyebab kegagalan, karena semua kegiatan telah berjalan dan menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan ini menghadapi beberapa hambatan atau permasalahan sebagai berikut ini:

1. Tim penyusun standar yang berasal dari berbagai unit/lembaga, terkadang ada yang berhalangan hadir dalam suatu pertemuan, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan secara utuh/penuh.
2. Sulitnya mencocokkan waktu dengan Tim Pengarah, sehingga pada saat pra Harmonisasi, tidak bisa semuanya hadir.
3. Terbatasnya jumlah lokasi uji publik, sehingga secara keterwakilan menurut lokasi geografis menjadi kurang mewakili.

Dari hambatan atau permasalahan yang muncul diatas, beberapa langkah antisipasi yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut adalah:

1. Langkah antisipasi yang sudah dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan secara hybrid serta memberikan notulen dari pertemuan yang tidak

diikuti oleh anggota Tim Penyusun yang tidak hadir saat diundang, sehingga mereka bisa mengetahui perkembangannya.

2. Langkah antisipasi yang sudah dilakukan adalah: bahan yang akan dibahas diberikan terlebih dahulu, pertemuan dilaksanakan berkali-kali dengan Tim Penyusun, dan melaporkan setiap pertemuan yang sudah dilaksanakan.
3. Langkah antisipasi yang sudah dilakukan adalah: mengundang peserta/penelaah standar dari lokasi yang berbeda dengan lokasi uji publik, sehingga bisa menambah informasi dari lokasi lainnya.

Beberapa strategi sudah dilakukan untuk mencapai target untuk Indikator Kinerja jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan ini. Strategi - strategi tersebut adalah:

1. Bekerjasama dengan unit/lembaga yang terkait/relevan dengan topik kegiatan yang dilaksanakan, terutama dalam pemenuhan sumberdaya/tenaga, sehingga kegiatan bisa berjalan lebih optimal, dan lebih berkembang baik secara substansi maupun teknis.
2. Penentuan perencanaan dari aspek timeline dan distribusi sumberdaya/tenaga, serta *monitoring progress* pelaksanaan kegiatan secara terjadwal, dan berkelanjutan.



## Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Sasaran kegiatan kedua Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan memiliki 2 IKK.

### Sasaran Kegiatan #2: Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

#### IKK #2.1

Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan  
Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan  
Pendidikan

#### IKK #2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L  
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

**Salah satu IKK mencapai 100%, IKK lainnya belum mencapai 100%**



### Indikator Kegiatan 2.1 Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Capaian predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Target 2022	Capaian 2022
A	A

Capaian predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan pada tahun berjalan dapat mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya pada Renstra PSKP.

Capaian ini didapatkan dengan nilai akuntabilitas sebesar 82.45 yang dihasilkan dari masing - masing nilai komponen sebesar 24.6 pada komponen perencanaan kinerja, 24.6 pada pengukuran kinerja, 12.75 pada pelaporan kinerja dan 20.5 pada evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Adapun dari capaian yang diraih PSKP masih mendapatkan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting program*)
2. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/ Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*)
3. Penyusunan Notula sebagai dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku.

dan mendapatkan beberapa rekomendasi untuk peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pada tahun selanjutnya sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja agar turut memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) dapat berupa laporan maupun dokumen pendukung lainnya
2. Satker agar dapat menyusun matriks peran hasil sesuai dengan indikator dan pengampu masing-masing indikator
3. Satker agar dapat menyusun notula/laporan setiap kegiatan sebagai bentuk dokumentasi dan perwujudan budaya kerja dengan berpedoman pada ketentuan tata naskah dinas yang berlaku.

IKK predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan ini adalah IKK baru dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan yang baru terbentuk selama satu tahun, sehingga tidak terdapat IKK serupa pada tahun sebelumnya.

Tahun berjalan	2022	2023	2024
Target	A	A	A
Capaian	A	-	-
Persentase	100%	-	-

Daftar kegiatan yang mendukung pencapaian predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran Satker
2. Pengelolaan Kepegawaian Satker
3. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan Satker

Dalam proses merealisasikan indikator kinerja ini, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target indikator kinerja ini. beberapa hal yang menjadi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja adalah

1. Kerjasama antara tim perencanaan dan evaluasi yang kuat sehingga proses perencanaan dan evaluasi dapat berjalan dengan baik.
2. Tim kepegawaian yang proaktif untuk menyampaikan pembaharuan dan informasi mengenai kepegawaian kepada setiap staf.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan ini menghadapi beberapa hambatan atau permasalahan sebagai berikut ini:

1. Perencanaan kinerja yang disajikan belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting program*).
2. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja yang disajikan belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*).
3. Penyusunan Notula sebagai dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku.
4. Kesulitan dalam menyamakan jadwal koordinator untuk dapat melakukan evaluasi secara berkala.

Dari hambatan atau permasalahan yang muncul diatas, beberapa langkah antisipasi yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut adalah:

1. Menyusun peta proses bisnis organisasi dengan tujuan untuk memetakan hubungan antara kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas ntar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
2. Menyusun dan menerapkan prosedur pelaksanaan kegiatan untuk mendokumentasikan dari setiap pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan komunikasi secara personal kepada masing – masing koordinator untuk melakukan evaluasi.

Beberapa strategi sudah dilakukan untuk mencapai target untuk Indikator Kinerja predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan ini. Strategi – strategi tersebut adalah:

1. Menyisipkan agenda evaluasi kinerja Satker dalam rapat rutin pimpinan secara berkala.
2. Penataan kepegawaian dan penguatan kearsipan yang rapi.



## Indikator Kegiatan 2.2

### Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator:

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

**Nilai Kinerja Anggaran:**  
**Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]**

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80%-90%	Baik
>60%-80%	Cukup
>50%-60%	Kurang
<%50	Sangat Kurang

**Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan adalah sebagai berikut:**

Target 2022	Capaian 2022
90.8	87.71

Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan pada tahun berjalan belum dapat mencapai target yang sudah ditentukan akan tetapi sudah mendekati target yang sudah diberikan pada Renstra PSKP. Capaian nilai NKA sebesar 87.71 tersebut dihitung dari capaian nilai IKPA sebesar 91.50 dan nilai EKA sebesar 85.18.

IKK Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan ini adalah IKK baru dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan yang baru satu tahun dibentuk, sehingga tidak ada IKK serupa pada tahun sebelumnya.

Tahun berjalan	2022	2023	2024
Target	90.8	90.8	90.8
Capaian	87.71	-	-
Persentase	96%	-	-

Dalam proses merealisasikan indikator kinerja ini, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target indikator kinerja ini. beberapa hal yang menjadi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja adalah nilai dari indikator IKPA Deviasi Hal III DIPA dan indikator penyerapan anggaran.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan ini menghadapi beberapa hambatan atau permasalahan sebagai berikut ini:

1. Capaian indikator Deviasi Hal III DIPA untuk triwulan pertama tahun 2022 tidak terbaharui sehingga nilai capaian yang telah ditargetkan tidak dapat dicapai.
2. Capaian indikator penyerapan anggaran pada tahun 2022 tidak

dapat dipenuhi sesuai target karena siklus dan karakteristik kegiatan yang dilakukan PSKP berbeda dengan cara perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

3. Pergantian kode satker dari Puslitjakdikbud menjadi PSKP di KPPN membuat proses pelaksanaan kegiatan sedikit terlambat
4. Masih adanya item anggaran yang terkunci
5. Banyak kegiatan yang perlu untuk mengikuti sistem lain yang berjalan, sehingga penjadwalannya harus dilaksanakan pada semester 2 tahun ini.
6. Penambahan anggaran pada akhir tahun membuat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan pada Triwulan 4.

Dari hambatan atau permasalahan yang muncul diatas, beberapa langkah antisipasi yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut adalah:

1. Melakukan pembaharuan rencana penyerapan anggaran pada setiap periode pelaporan evaluasi kinerja.
2. Melakukan modifikasi jadwal pelaksanaan kegiatan agar beberapa tahap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada setiap triwulan.
3. Melakukan akselerasi kegiatan pada Triwulan 2 dan Triwulan 3.
4. Membuka item anggaran yang terkunci.
5. Memampatkan kegiatan yang terhambat karena perlu menyesuaikan sistem lain.
6. Melakukan revisi rencana kegiatan untuk dapat menyesuaikan dengan penyerapan anggaran baru.

Beberapa strategi sudah dilakukan untuk mencapai target untuk Indikator Kinerja Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan ini. Strategi - strategi tersebut adalah:

1. Melakukan identifikasi output-output kegiatan yang relatif dapat dicapai dalam waktu yang singkat, dan melaksanakan kegiatan tersebut pada awal tahun anggaran.
2. Melakukan manajemen tim pelaksana kegiatan yang lebih baik agar kegiatan dapat dilaksanakan secara simultan.
3. Melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan dengan institusi/ organisasi lain sebagai percepatan pelaksanaan kegiatan.

## 2. Realisasi Anggaran

### A. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Pusat Standar Dan Kebijakan Pendidikan dalam DIPA tahun 2022 sebesar **Rp. 52.217.117.000** Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar **Rp. 48.471.284.879** dengan persentase daya serap sebesar **92.83%**

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	Realisasi	%
1	Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	1	Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	13 Rekomendasi	21 Rekomendasi	20.537.896.000	26.875.863.000	25.199.079.753	93.76%
		2	Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	10.555.400.000	11.421.837.000	10.601.315.384	92.82%

No	Output	Target 2022	Realisasi 2022	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	Realisasi	%
1	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	10 Rekomendasi	18 180%	14.117.500.000	21.632.131.000	20.348.682.295	94.07%
2	Rapor Pendidikan yang dikembangkan	3 Rekomendasi	3 100%	6.420.396.000	5.243.732.000	4.850.397.458	92.50%
3	Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan	10 Rekomendasi	10 100%	10.555.400.000	11.421.837.000	10.601.315.384	92.82%
4	Layanan umum	1 Layanan	1 100%	1.000.000.000	1.000.000.000	945.874.909	94.59%
5	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 100%	20.219.083.000	12.679.417.000	11.740.436.456	92.59%
6	Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 100%	1.750.867.000	240.000.000	236.011.391	98.34%

No	Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	%
1	Belanja Modal	1.750.867.000	240.000.000	236.011.391	98.34%
2	Belanja Pegawai	17.939.991.000	10.133.597.000	9.280.226.960	91.58%
3	Belanja Barang	34.372.388.000	41.843.520.000	39.206.479.542	93.70%

## B. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Pusat Standar Dan Kebijakan Pendidikan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 1.846.129.000,- (3,41%)**

Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari kegiatan *phone survey* studi cepat, *phone survey* evaluasi pelatihan Sekolah Penggerak dan konsultan pengolahan data evaluasi. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti seleksi dan uji kompetensi analis kebijakan dan sosialisasi kebijakan perbukuan yang dilaksanakan bersama Komisi X DPR RI.

Adanya sisa anggaran sebanyak **7.17%** atau sebesar **Rp. 3.745.832.121,-** berasal dari Belanja Modal sebesar **Rp. 3.988.609,-**, Belanja Pegawai sebesar **Rp. 833.370.040,-** dan Belanja Barang sebesar **Rp. 2.637.040.458,-**

### 3. Inovasi, Penghargaan, dan Program *Crosscutting / Collaborative*

#### A. Inovasi

Pada tahun 2022, Pusat Standar Dan Kebijakan Pendidikan melakukan inovasi sebagai berikut:

1. Inovasi Permendikbud SPM dimana indikator yang ada dalam Permendikbud SPM yang kemudian menjadi rujukan dari Permendagri SPM tidak lagi hanya berpusat pada akses dan pemenuhan sarana dan prasarana. Akan tetapi, sekarang lebih kepada kualitas layanan pendidikan dimana diharapkan dapat meratakan kualitas mutu layanan pendidikan di Indonesia dengan dorongan yang tidak hanya diberikan oleh Kemendikbudristek akan tetapi juga dengan dorongan dari Kemendagri untuk pemenuhan SPM bidang pendidikan tersebut. PSKP disini bertugas untuk menyusun substansi dari isi Permendikbud SPM tersebut.
2. Penyusunan Standar Nasional Pendidikan dengan paradigma baru sebagai berikut:
  - a. Umum, hanya mengatur hal-hal prinsip
  - b. Holistik, bersifat lintas jalur, jenis, dan jenjang
  - c. Fokus pada kualitas pembelajaran, SKL sebagai acuan standar lainnya
  - d. Substantif, fokus pada substansi dan meminimalisir tendensi tuntutan administratif
  - e. Inklusif, mempertimbangkan keragaman karakteristik satuan pendidikan di Indonesia
  - f. Memantik inisiatif dan inovasi
  - g. Ringkas, mudah dipahami dan dijadikan kompas

## B. Penghargaan

Pada tahun 2022, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan mendapatkan penghargaan penghargaan Satker dengan indikator pengelolaan arsip terbaik yang diberikan oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan.



## C. Program *Crosscutting / Collaborative*

Pada tahun 2022, Pusat Standar Dan Kebijakan Pendidikan melakukan program *crosscutting / collaborative* nama program *crosscutting / collaborative* berupa:

Pengembangan Rapor Pendidikan

1. Pihak-pihak yang berkaitan pada program

i. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) memiliki tugas untuk menyusun Substansi dari Rapor Pendidikan dan memastikan substansi tersebut selaras dengan Visi Misi Pendidikan di Indonesia. Selain itu, PSKP juga bertugas untuk menyusun laporan pada level nasional dengan data yang ada dalam *Platform* Rapor Pendidikan, dan melakukan evaluasi mengenai pemanfaatan *Platform* Rapor Pendidikan dan pelaksanaan PBD baik oleh Satuan Pendidikan maupun dinas pendidikan.

## ii. Pusat Asesmen Pendidikan

Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) bertugas untuk melaksanakan asesmen nasional dan melakukan analisis hasil Asesmen Nasional yang nantinya data hasil analisis ini akan muncul di *Platform* Rapor Pendidikan untuk setiap Satuan maupun Dinas Pendidikan. Selain itu, Pusmendik juga memiliki peran sebagai pemilik data AN dimana 60% data yang ada dalam *Platform* Rapor Pendidikan.

## iii. Direktorat terkait

Peran direktorat terkait mengenai pengembangan *Platform* Rapor Pendidikan adalah sebagai pemilik data. Selain Dari data AN, dalam Rapor pendidikan juga terdapat data lain seperti data Dapodik, tracer study SMK, Data BPS, dan masih banyak datanya dimana beberapa data ini diproduksi oleh Direktorat terkait. Contohnya Data Dapodik yang dikumpulkan oleh Direktorat PAUDDasmen dan GTK.

## iv. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi disini berperan sebagai pengelola dan penyimpan data dari *Platform* Rapor Pendidikan dimana Pusdatin bertugas untuk mengumpulkan semua data yang ada di *Platform* Rapor Pendidikan dari direktorat terkait. Selain itu, Pusdatin juga berperan sebagai pengembang aplikasi *Platform* Rapor Pendidikan.

## 2. Dampak dari program

Dampak dari pengembangan Rapor Pendidikan ini bukan kepada kemendikbudristek. akan tetapi, lebih kepada Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan yang mendapatkan data kualitas pelayanan pendidikan baik pada level satuan pendidikan maupun pada level dinas pendidikan dimana *Platform* Rapor Pendidikan ini ditujukan. Dengan adanya Metode Perencanaan Berbasis Data yang menggunakan data yang ada dalam *Platform* Rapor Pendidikan sebagai landasannya, diharapkan Pengelola Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan dapat melakukan refleksi mengenai kondisi layanan pendidikan yang ada saat ini dan menentukan pembenahan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan baik pada tingkat satuan maupun pada tingkat daerah.

## c. Bukti

SK tim pengembangan rapor pendidikan.







# BAB IV

PENUTUP



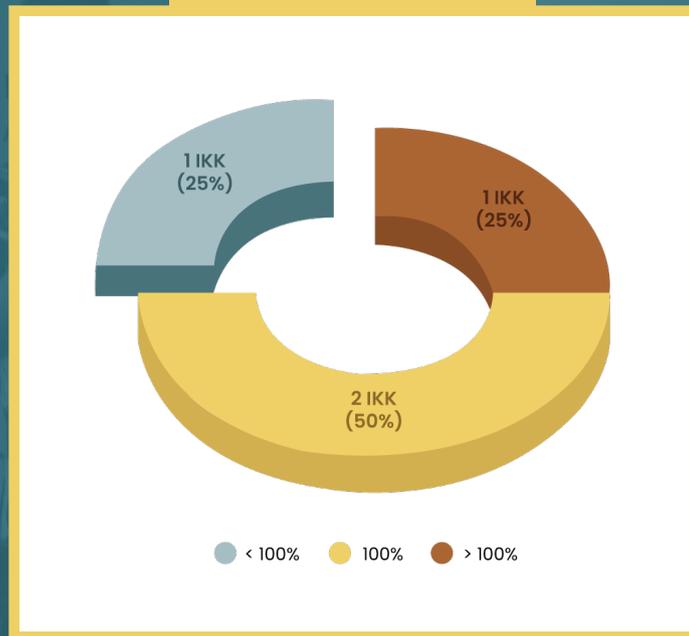
# BAB IV

## PENUTUP

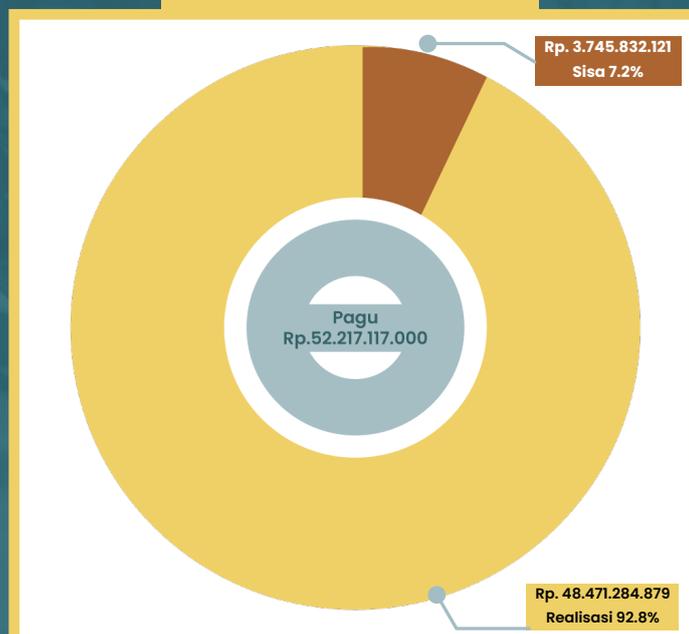
Selama tahun 2022, Pusat Standar Dan Kebijakan Pendidikan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

### Ringkasan Kinerja

#### Capaian Kinerja



#### Kinerja Keuangan



Capaian Kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dapat dinyatakan berhasil. 3 dari IKK yang harus dipenuhi sudah mencapai 100% (Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan, dan Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan) dan bahkan salah satu diantaranya mencapai 161% (Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan). Walaupun salah satu IKK yang belum mencapai 100%, akan tetapi sudah mendekati 100% di angka 96% (Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan).

Capain kinerja tersebut telah didukung pencapaian kinerja keuangan pada Tahun 2022 ini dengan penggunaan anggaran sebesar **Rp. 48.471.284.879** atau **92.8%** dari total pagu akhir sebesar **Rp. 52.217.117.000**.

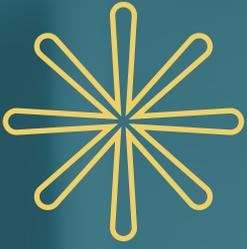
Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

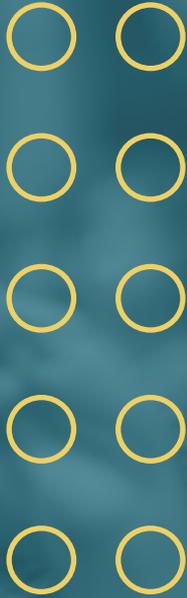
1. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, terdapat perubahan kebutuhan pelaksanaan kegiatan sehingga memerlukan pergeseran anggaran antar output/komponen.
2. Deviasi halaman III DIPA.
3. Permasalahan izin akses untuk data yang akan diolah untuk analisis dan evaluasi kebijakan.
4. Sulitnya memfasilitasi diskusi penyusunan standar terutama pada saat terjadi diskusi yang intense antar anggota tim.
5. Kurangnya SDM baik dalam jumlah maupun kapasitas
6. Membutuhkan pendampingan dalam proses merumuskan rekomendasi.
7. Perlunya penyelarasan standar yang sedang disusun dengan peraturan permendikbud lainnya.
8. Kurangnya pembaharuan informasi mengenai standar yang sedang disusun kepada Tim Pengarah sehingga muncul miskonsepsi yang tidak sesuai dengan Tim Pengarah.
9. Report mengenai Kualitas hasil belajar literasi, numerasi, dan karakter yang memerlukan data AN tahun 2022 sehingga tidak dapat diterbitkan pada tahun ini.
10. Kesulitan dalam menyamakan jadwal koordinator untuk dapat melakukan evaluasi secara berkala.

**Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:**

1. Melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan
2. Melakukan pengecekan dan pembaharuan halaman III Dipa setiap periode triwulan.
3. Melakukan akselerasi untuk permohonan akses data dan SK akses data jika diperlukan.
4. Berusaha sebaik mungkin untuk menggiring diskusi tetap pada substansi yang ada dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pembagian tugas dengan mengikutsertakan anggota tim dari koordinator lain yang kegiatannya sudah selesai untuk mengurangi beban pekerjaan anggota tim.
6. Mengundang ahli pada bidang yang sesuai dengan topik rekomendasi sebagai pendamping.
7. Memastikan penyusunan standar yang sedang disusun agar selaras dengan permendikbud yang sudah ada.
8. Mengikutsertakan Tim Pengarah dalam proses penyusunan dengan melakukan pembaharuan informasi kepada Tim Pengarah di tengah - tengah proses penyusunan standar.
9. Penerbitan report mengenai Kualitas hasil belajar literasi, numerasi, dan karakter dilakukan juga dengan data T-1.
10. Memastikan jadwal dari koordinator di setiap akhir triwulan untuk melakukan evaluasi.







# LAMPIRAN



## 1. Perjanjian Kinerja Awal



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**  
**Dengan**  
**Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Irsyad Zamjani**

**Jabatan : Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Anindito Aditomo**

**Jabatan : Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 22 Maret 2022

**Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan  
Asesmen Pendidikan**



**Anindito Aditomo**

**Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan  
Pendidikan**



**Irsyad Zamjani**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	13
		[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	10
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	90,8

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6696	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan	Rp. 31.093.296.000
2	2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	Rp. 22.969.950.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 54.063.246.000</b>

Jakarta, 22 Maret 2022

**Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan  
Asesmen Pendidikan**

**Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan  
Pendidikan**



**Anindito Aditomo**



**Irsyad Zamjani**

## 2. Perjanjian Kinerja



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**  
**Dengan**  
**Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Irsyad Zamjani**

**Jabatan : Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Anindito Aditomo**

**Jabatan : Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 28 Desember 2022

**Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan  
Asesmen Pendidikan,**



**Anindito Aditomo**

**Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan  
Pendidikan,**



**Irsyad Zamjani**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	13
		[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	10
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	90.8

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6696	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan	Rp. 38.297.700.000
2	2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	Rp. 13.919.417.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 52.217.117.000</b>

Jakarta, 28 Desember 2022

**Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan  
Asesmen Pendidikan,**

**Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan  
Pendidikan,**



**Anindito Aditomo**



**Irsyad Zamjani**

### 3. Pengukuran Kinerja



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan  
PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
Tahun 2022**

**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
----	------------------	----------------------------	--------	-----------	---------------------------	--------------------	---------------------------

1	[SK 1.0] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.1] Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	13	<p><b>TW1 : 0</b></p> <p><b>TW2 : 1</b></p> <p><b>TW3 : 5</b></p> <p><b>TW4 : 13</b></p>	<p><b>TW1 : 0</b></p> <p><b>TW2 : 2</b></p> <p><b>TW3 : 12</b></p> <p><b>TW4 : 21</b></p>	<p><b>TW1 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b></p> <p>1 kegiatan sudah melaksanakan penyusunan desain kegiatan yaitu kegiatan Rapor Pendidikan yang dikembangkan. Pada TW 1 ini memang belum ada kegiatan yang dapat diselesaikan karena progres kegiatan yang memiliki beberapa tahap sehingga belum dapat diselesaikan pada TW 1 ini.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b></p> <p>1. Pergantian kode satker dari Puslitjakdikbud menjadi PSKP di KPPN membuat proses pelaksanaan kegiatan sedikit terlambat 2. Adanya perubahan kebutuhan pelaksanaan kegiatan sehingga memerlukan pergeseran anggaran antar output/komponen</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b></p> <p>1. Melakukan akselerasi kegiatan pada Triwulan 2 dan Triwulan 3 2. Melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan</p> <p><b>TW2 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b></p> <p>Kegiatan yang sudah selesai : 1. Studi cepat adaptasi perubahan kurikulum di jenjang SMA. 3. Studi cepat pemanfaatan dana BOS untuk buku teks kurikulum merdeka di daerah khusus. Kegiatan yang sedang berjalan: 1. Studi cepat G20. 2. Studi cepat evaluasi dampak. 3. Studi evaluasi implementasi kurikulum merdeka secara mandiri substansi yang sudah berjalan hanya untuk penggunaan dana masih belum berjalan. 4. Kegiatan jurnal sudah melaksanakan penyusunan desain. 5. Kegiatan buku sudah melaksanakan penyusunan desain. 6. Kegiatan policy brief sudah melaksanakan penyusunan desain. 7. Kegiatan pemetaan hasil evaluasi sistem pendidikan baru melaksanakan penyusunan desain. 8. Kegiatan evaluasi pemanfaatan hasil evaluasi sistem pendidikan sudah menyelesaikan tahapan penyusunan instrumen 9. Kegiatan rewiu komponen rapor pendidikan sudah berjalan setengahnya.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b></p> <p>1. Permasalahan pada kegiatan pemetaan hasil evaluasi sistem pendidikan dimana kegiatan terhambat karena permasalahan jln akses untuk data dalam platform rapor pendidikan yang akan diolah sehingga kegiatan belum dapat dilanjutkan.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b></p> <p>1. Melakukan akselerasi untuk SK akses data dan pelatihan penggunaan data.</p> <p><b>TW3 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b></p> <p>10 analisis kebijakan pendidikan yang sudah selesai adalah: 1. Studi Cepat Adaptasi Perubahan Kurikulum di Jenjang SMA 2. Studi Cepat dalam rangka Mendukung Penyusunan Laporan G20 Education Working Group 3. Studi Cepat Pembelanjaan BOS/BOP Reguler untuk mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka 4. Analisis Hasil Kunjungan Kerja Pimpinan Implementasi Kurikulum Merdeka 5. Evaluasi Strategi Pendukung IKM di Daerah 6. Refleksi Kesiapan Implementasi Kurikulum Merdeka 7. Survei Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka &amp; Analisis Media Online dan Media Sosial 8. Survei Pelaksanaan Bimbingan Teknis dalam Rangka Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka di Jenjang Sekolah Dasar 9. Survei Pelaksanaan Bimbingan Teknis dalam rangka Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka di Jenjang SMP 10. Survei Pelaksanaan Bimbingan Teknis dalam rangka Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka di Jenjang SMA Kegiatan analisis kebijakan yang sedang berjalan adalah: 1. Studi Mendalam Studi Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka 2. Evaluasi Implementasi Program Sekolah Penggerak 3. Evaluasi Kebijakan Strategis (Monev SMK PK) 4. Evaluasi Kebijakan Strategis (Sekolah Penggerak PAUD)</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b></p> <p>Kendala yang dihadapi adalah: 1. Kurangnya SDM baik dalam jumlah maupun kapasitas 2. Dengan padatnya waktu pelaksanaan kegiatan, kurang adanya cukup waktu untuk melakukan proses berpikir untuk merumuskan rekomendasi kebijakan 3. Membutuhkan pendampingan dalam proses merumuskan rekomendasi kebijakan</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b></p> <p>Strategi/tindak lanjut yang bisa dilakukan adalah: 1 &amp; 2. Mengikutsertakan anggota tim dari koordinator lain yang kegiatannya sudah selesai untuk mengurangi beban pekerjaan anggota tim 3. Mengundang ahli pada bidang yang sesuai dengan topik rekomendasi sebagai pendamping</p> <p><b>TW4 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b></p> <p>19 analisis kebijakan pendidikan yang sudah selesai adalah: 1. Studi Cepat Adaptasi Perubahan Kurikulum di Jenjang SMA 2. Studi Cepat dalam rangka Mendukung Penyusunan Laporan G20 Education Working Group 3. Studi Cepat Pembelanjaan BOS/BOP Reguler untuk mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka 4. Studi Cepat Analisis Dampak Implementasi Kurikulum Merdeka 5. Studi Mendalam Studi Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka 6. Studi Mendalam Kolaborasi Kebijakan Pendidikan Pemerintah Pusat dan Daerah 7. Evaluasi Implementasi Program Sekolah Penggerak 8. Evaluasi Dampak Program Sekolah Penggerak 9. Evaluasi Proses dan Konteks Perubahan Program Sekolah Penggerak 10. Evaluasi Kebijakan Strategis (Sekolah Penggerak PAUD) 11. Evaluasi Kebijakan Strategis (Monev Kampus Mengajar) 12. Evaluasi Kebijakan Strategis (Monev SMK PK) 13. Analisis Hasil Kunjungan Kerja Pimpinan Implementasi Kurikulum Merdeka 14. Evaluasi Strategi Pendukung IKM di Daerah 15. Refleksi Kesiapan Implementasi Kurikulum Merdeka 16. Kajian Kesiapan Bahasa Inggris untuk Mapel SD/MI 17. Survei Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka &amp; Analisis Media Online dan Media Sosial 18. Survei Pelaksanaan Bimbingan Teknis dalam Rangka Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka di Jenjang SMA 19. Pengembangan Rapor Pendidikan 20. Analisis Pemetaan Mutu Pendidikan 21. Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan Beberapa permintaan kajian dari direktorat terkait disampaikan setelah dilaksanakannya perencanaan sehingga jumlah capain IKK ini jauh diatas target</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b></p> <p>1. Penyesuaian skala data yang harus menunggu dari pemilik data sehingga menghambat proses penyusunan Report 2. Report mengenai Kualitas hasil belajar literasi, numerasi, dan karakter yang memerlukan data AN tahun 2022 sehingga tidak dapat diterbitkan pada tahun ini.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b></p> <p>1. Mengadakan rapat kerja bersama dengan pemilik data untuk menyepakati metodologi untuk menyamakan skala dari data yang akan digunakan. 2. Merencanakan penerbitan selanjutnya dengan data T-1</p>
---	---	--	-----------------------	----	--	---	---

2	[SK 1.0] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.2] Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	10	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 10</b>	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 2</b> <b>TW3 : 8</b> <b>TW4 : 10</b>	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Beberapa kegiatan standar sudah memulai kegiatan dan 1 kegiatan dalam proses merumuskan rancangan regulasi. 1. Kajian Akademik Standar Pengelolaan Pendidikan sudah menjalankan langkah penyusunan desain. 2. Kajian Akademik Standar Pembiayaan Pendidikan sudah melakukan tahapan penyusunan desain 3. Kajian Akademik Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sudah melakukan tahapan penyusunan desain 4. Standar Nasional Pendidikan Standar Tenaga Kependidikan sudah melakukan tahapan penyusunan desain 5. Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi sudah melakukan penyempurnaan draf SN PAUDDASMEN Proses penyusunan standar yang memiliki beberapa tahap baru dapat diselesaikan pada akhir tahun, sehingga realisasinya baru dapat muncul nanti pada TW 4</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Pergantian kode satker dari Puslitjakkidbud menjadi PSKP di KPPN membuat proses pelaksanaan kegiatan sedikit terlambat 2. Adanya perubahan kebutuhan pelaksanaan kegiatan sehingga memerlukan pergeseran anggaran antar output/komponen</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Melakukan akselerasi kegiatan pada Triwulan 2 dan Triwulan 3 2. Melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Standar yang sudah diselesaikan: 1. Standar pendidik dan, 2. Standar kepala pendidik. Standar yang masih dalam proses penyusunan: 1. Standar sarana dan prasarana. 2. Standar pembiayaan pendidikan sudah akan masuk ke tahapan penelaahan dan penyempurnaan draf standar pendidikan. 3. Evaluasi standar untuk pemenuhan RAN HAM. 4. Kajian akademik pedoman pengarusutamaan pendidikan inklusif pada SNP sudah pada tahap penyusunan desain.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Kesulitan dalam penentuan waktu kegiatan karena anggota tim penyusunan standar bukan dari staf PSKP sehingga sulit untuk menentukan jadwal. 2. Permintaan dari dirjen GTK untuk memundurkan penyusunan standar pengawas. 3. Sulitnya memfasilitasi diskusi terutama pada saat terjadi diskusi yang intense antar anggota tim.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Menyesuaikan jadwal kegiatan dengan ketua tim penyusunan standar. 2. memampatkan waktu penyusunan standar pengawas. 3. Berusaha sebaik mungkin untuk menggiring diskusi tetap pada substansi yang ada dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Beberapa kegiatan standar yang dalam proses adalah: 1. Penyusunan Standar Tenaga Kependidikan 2. Penyusunan Standar Tenaga Kependidikan 3. Pedoman Pengarusutamaan Pendidikan Inklusif 4. Analisis Kebijakan Standar Pengelolaan Pendidikan 5. Analisis Kebijakan Standar Pembiayaan Pendidikan 6. Analisis Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Kendala yang muncul dalam proses penyusunan standar adalah: 1. Adanya arahan untuk menyelaraskan standar yang disusun dengan peraturan permendikbud lainnya. 2. Munculnya dinamika dengan Tim Pengarah terutama mengenai standar yang sudah disusun</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Tindak lanjut yang dilakukan: 1. Melakukan revisi terhadap draft standar yang sudah disusun agar searas dengan permendikbud yang sudah ada 2. Mengikutsertakan Tim Pengarah dalam proses penyusunan dengan melakukan update ke Tim Pengarah di tengah - tengah proses penyusunan standar.</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  10 kegiatan penyusunan rekomendasi standar di bidang pendidikan yang sudah diselesaikan adalah: 1. Penyusunan Standar Tenaga Kependidikan 2. Penyusunan Standar Kepala Satuan Pendidikan 3. Pedoman Pengarusutamaan Pendidikan Inklusif 4. Analisis Kebijakan Standar Pengelolaan Pendidikan 5. Analisis Kebijakan Standar Pembiayaan Pendidikan 6. Analisis Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 7. Evaluasi Standar Sekolah Rumah 8. Evaluasi Standar Pendidikan Layanan Khusus 9. Evaluasi Implementasi Standar Nasional Pendidikan: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan 10. Kajian dan evaluasi Penguatan Efektivitas Kelembagaan BAN PAUD dan PNF dan BAN Sekolah/Madrasah</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Kemunduran proses harmonisasi dikarenakan perlu menunggu revisi PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan PP 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Menyiapkan draf RPM standar yang sudah disesuaikan dengan revisi PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan PP 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan sehingga dapat segera diajukan jika revisi PP tersebut selesai dilaksanakan</p>
---	---	---	-----------------------	----	---	---	---

3	[SK 2.0] Meningkatkan tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Predikat	A	<p><b>TW1</b> : -</p> <p><b>TW2</b> : -</p> <p><b>TW3</b> : -</p> <p><b>TW4</b> : A</p>	<p><b>TW1</b> : -</p> <p><b>TW2</b> : -</p> <p><b>TW3</b> : -</p> <p><b>TW4</b> : A</p>	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  1. Penyelesaian Perjanjian Kinerja (PK) 2022 2. Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2022 Nilai predikat SAKIP akan dapat dilihat pada akhir Triwulan 4</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Pergantian kode satker dari Puslitjakdikbud menjadi PSKP di KPPN membuat proses pelaksanaan kegiatan sedikit terlambat</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  2. Melakukan akselerasi kegiatan pada Triwulan 2 dan Triwulan 3</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Program dan Anggaran PSKP untuk Triwulan II Tahun 2022.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Masih ada item anggaran yang terkunci 2. Banyak kegiatan yang perlu untuk mengikuti sistem lain yang berjalan, sehingga pnejadwalannya harus dilaksanakan pada semester 2 tahun ini</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Membuka item anggaran yang terkunci 2. Memampatkan kegiatan yang terhambat karena perlu menyesuaikan sistem lain.</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Program dan Anggaran PSKP untuk Triwulan III Tahun 2022.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Kendala yang muncul adalah ada item anggaran dari belanja modal (kendaraan dinas dan perangkat laptop) yang masih dikunci sehingga tidak dapat direalisasikan</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Tindak lanjut yang dilakukan adalah menggeser anggaran yang dikunci kepada sisa anggaran gaji pegawai untuk kendaraan dinas sehingga bisa segera direalisasikan</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Pelaksanaan kegiatan evaluasi Triwulan IV 2022</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Kesulitan dalam menyamakan jadwal koordinator untuk dapat melakukan evaluasi secara berkala</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Melakukan komunikasi secara personal kepada masing - masing koordinator untuk melakukan evaluasi</p>
3	[SK 2.0] Meningkatkan tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Nilai	90.8	<p><b>TW1</b> : 0</p> <p><b>TW2</b> : 0</p> <p><b>TW3</b> : 0</p> <p><b>TW4</b> : 90.8</p>	<p><b>TW1</b> : 0</p> <p><b>TW2</b> : 0</p> <p><b>TW3</b> : 0</p> <p><b>TW4</b> : 87.71</p>	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Nilai IKPA sementara sebesar 60.72</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Pergantian kode satker dari Puslitjakdikbud menjadi PSKP di KPPN membuat proses pelaksanaan kegiatan sedikit terlambat 2. Kurangnya penyerapan anggaran 3. Deviasi halaman III DIPA</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Melakukan akselerasi kegiatan pada Triwulan 2 dan Triwulan 3 2. Meningkatkan penyerapan anggaran pada TW 2 3. Melakukan update halaman III DIPA pada periode TW 2</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Nilai capaian IKPA Pusat Standar dan kebijakan Pendidikan adalah 69.69 dan nilai capaian SMART DJA Pusat Standar dan kebijakan Pendidikan adalah 14.15. Sehingga nilai capaian kinerja anggaran dari Pusat Standar dan kebijakan Pendidikan adalah 50.48</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Masih ada item anggaran yang terkunci 2. Banyak kegiatan yang perlu untuk mengikuti sistem lain yang berjalan, sehingga pnejadwalannya harus dilaksanakan pada semester 2 tahun ini</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Membuka item anggaran yang terkunci 2. Memampatkan kegiatan yang terhambat karena perlu menyesuaikan sistem lain.</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Nilai capaian IKPA Pusat Standar dan kebijakan Pendidikan adalah 63.06 dan nilai capaian SMART DJA Pusat Standar dan kebijakan Pendidikan adalah 43.75. Sehingga nilai capaian kinerja anggaran dari Pusat Standar dan kebijakan Pendidikan adalah 53.63</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Kendala yang muncul adalah ada item anggaran dari belanja modal (kendaraan dinas dan perangkat laptop) yang masih dikunci sehingga tidak dapat direalisasikan</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Tindak lanjut yang dilakukan adalah menggeser anggaran yang dikunci kepada sisa anggaran gaji pegawai untuk kendaraan dinas sehingga bisa segera direalisasikan</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Nilai capaian IKPA Pusat Standar dan kebijakan Pendidikan per tanggal 13 Januari 2022 adalah 91.50 dan nilai capaian SMART DJA Pusat Standar dan kebijakan Pendidikan adalah 85.18. Sehingga per tanggal tersebut diatas nilai capaian kinerja anggaran dari Pusat Standar dan kebijakan Pendidikan adalah 87.71</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Penambahan anggaran pada akhir tahun membuat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan pada Triwulan 4</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Melakukan revisi rencana kegiatan untuk dapat menyesuaikan dengan penyerapan anggaran baru yang dikoreksikan</p>

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Pengukuran Kinerja Rincian Output**

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
<b>1</b>	<b>Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan</b>	<b>16.0000</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	0	3	10	18	<b>Rp. 21.632.131.000</b>
2	[051] Penyusunan Desain			0	8	12	15	Rp. 1.554.572.000
3	[052] Pelaksanaan			0	3	8	18	Rp. 16.426.648.000
4	[053] Penyusunan Laporan			0	2	3	15	Rp. 3.650.911.000
<b>5</b>	<b>Rapor Pendidikan yang dikembangkan</b>	<b>3.0000</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	0	0	0.52	3	<b>Rp. 5.243.732.000</b>
6	[051] Persiapan			0	2	3	3	Rp. 282.170.000
7	[052] Pelaksanaan			0	0	1	3	Rp. 4.202.218.000
8	[053] Penyusunan Laporan			0	0	0	3	Rp. 759.344.000
<b>9</b>	<b>Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan</b>	<b>10.0000</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	0	2	6	10	<b>Rp. 11.421.837.000</b>
10	[051] Penyusunan Desain			0	5	10	10	Rp. 1.736.250.000
11	[052] Pelaksanaan			0	2	6	10	Rp. 5.383.999.000
12	[053] Sinkronisasi dan Harmonisasi			0	2	4	10	Rp. 2.642.410.000
13	[054] Perumusan Kebijakan			0	0	6	10	Rp. 1.659.178.000
<b>14</b>	<b>Layanan Umum</b>	<b>1.0000</b>	<b>Layanan</b>	0	0	0.7	1	<b>Rp. 1.000.000.000</b>
15	[065] Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Satker			0	0	0	1	Rp. 213.075.000
16	[066] Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan satker			0	0	0	1	Rp. 396.580.000
17	[067] Pengelolaan kepegawaian Satker			0	0	0	1	Rp. 56.935.000
18	[068] Pelayanan umum Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan satker			0	0	0	1	Rp. 333.410.000
<b>19</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1.0000</b>	<b>Layanan</b>	0	0	0.75	1	<b>Rp. 12.679.417.000</b>
20	[001] Gaji dan Tunjangan			3	6	9	12	Rp. 10.133.597.000
21	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3	6	9	12	Rp. 2.545.820.000
<b>22</b>	<b>Layanan Sarana Internal</b>	<b>6.0000</b>	<b>Unit</b>	0	0	5	6	<b>Rp. 240.000.000</b>
23	[997] Peralatan Fasilitas Perkantoran			0	0	5	6	Rp. 240.000.000
<b>TOTAL JUMLAH PAGU</b>								<b>Rp. 52.217.117.000</b>

Jakarta, 13 Januari 2023

**Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan,**



**Irsyad Zamjani**

#### 4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244,  
Laman <https://bskap.kemdikbud.go.id>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
BADAN STANDAR, KURIKULUM,  
DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu laporan kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 24 Januari 2023

KETUA TIM REVIU INTERNAL



Andry Rihardika  
NIP 198408172009121003



